



**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2012**



**Jakarta, Maret 2013**

## **KATA PENGANTAR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama tahun 2012 dapat disusun sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama tahun 2012 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Kementerian/Lembaga menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kementerian Agama dalam mencapai tujuan/sasaran strategi Kementerian Agama.

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, bahwa peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan melalui empat prioritas, yaitu: (1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (4) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010. Selain keempat prioritas pembangunan bidang agama juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama; (b) peningkatan informasi dan pelayanan publik; (c) peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama; (d) peningkatan pendidikan dan pelatihan; (e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas Kementerian/Lembaga. Selain kebijakan di dalam kehidupan beragama pada bidang pendidikan nasional diarahkan pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat.

Berdasarkan kebijakan nasional tersebut, Kementerian Agama Tahun 2010-2014 menetapkan **lima kebijakan**, yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama, dengan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “**Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional**”; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, dengan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “**Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional**”; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, dengan

sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “**Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa**”; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dengan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “**Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat**” dan; (5) perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “ **Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional**”.

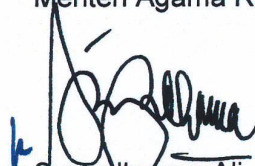
Adapun strategi untuk mewujudkan lima misi tersebut dituangkan ke dalam 11 (sebelas) program, yaitu: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama; (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Kementerian Agama; (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Agama; (4) Program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan Kementerian Agama; (5) program penyelenggaraan haji dan umrah; (6) program pendidikan Islam; (7) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (8) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (9) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (10) Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dan; (11) Program Bimbingan Masyarakat Buddha.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Agama Tahun 2012 merupakan wujud pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil dan sebagai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan LAKIP disusun dengan sistem berjenjang dengan menerapkan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta Monitoring dan Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan dari setiap satuan organisasi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberi umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

**Jakarta, Maret 2013**

Menteri Agama RI,



Suryadharma Ali

## **DAFTAR ISI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Hal i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok,dan Fungsi.....	2
C. Aspek Strategis.....	3
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistem Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. RPJMN 2010-2014 .....	7
B. Rencana Strategis .....	10
C. Penetapan Kinerja .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	37
A. Pengukuran Kinerja .....	37
B. Analisis Capaian Kinerja .....	39
C. Akuntabilitas Keuangan .....	63
BAB IV PENUTUP .....	67
LAMPIRAN:	
I. Rencana Kinerja Tahunan	
II. Penetapan Kinerja	
III. Pengukuran Kinerja	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tahun 2010-2014. Di samping itu Kementerian Agama juga melaksanakan sebagian program pembangunan nasional di bidang pendidikan yaitu Raudhatul Athfal, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Kementerian Agama telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang dituangkan dalam 11 Program Kementerian Agama. Kelima sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja dan 20 target kinerja. Untuk mewujudkan lima sasaran strategis Kementerian Agama dalam tahun 2012 telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja yang berisikan 5 sasaran strategis, 17 indikator kinerja, dan 20 target kinerja.

Dari lima sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2012 tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yang dilaksanakan dengan baik melampaui target 100%, yaitu: (1) terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama; (2) terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing; (3) tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat. Sedangkan 2 (dua) sasaran strategis lainnya capaian target di atas 90%, yaitu: (1) terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional dan (2) terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional. Meskipun demikian tingkat capaian 2 (dua) sasaran strategis tersebut telah mencapai di atas 90%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
<b>Terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama	43%	41,52%	96,56%
2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama	45%	43,70%	97,11%
3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	31%	28,10%	90,65%
4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama	34%	31,80%	93,53%
<b>Sasaran Strategis 2</b>			
<b>Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk;	15 lembaga	15 lembaga	100%
2. Pemulihan Pasca konflik	1 kegiatan	1 kegiatan	100%



<b>Sasaran Strategis 3</b>			
<b>Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. APK Lembaga Pendidikan Islam			
- MI	13,55%	10,65%	78,60%
- MTs.	20,22%	18,64%	92,18%
- MA	7,35%	14,08%	191,56%
- PTAI	2,89%	3,28%	113,49%
2. APM Lembaga Pendidikan Islam			
- PTAI	2,35%	3,28%	139,57%
3. Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional	8.00	7,95	99,37%
<b>Sasaran Strategis 4</b>			
<b>Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Indeks kualitas pembinaan dan pelayanan haji dan umrah	50%	50%	100%
2. Indeks kualitas pengembangan informasi haji	50%	50%	100%
<b>Sasaran Strategis 5</b>			
<b>Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. % SDM berkinerja sangat baik	40%	38,80%	97%
2. Persentase ketersediaan SPM & SPO	80%	70%	87,50%
3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP	WTP(DPP)	95%
4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan	33 provinsi	33 provinsi	100%
5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan	15%	12%	120%
6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.	90%	42,47%	47,19%

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan kinerja Kementerian Agama dalam tahun 2012 mencapai rata-rata sebesar 100,94%, lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2011 sebesar 92%. Yang mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah keberhasilan pada bidang pendidikan Islam, dengan rata-rata capaian sebesar 119,30%. Yang menjadi indikator pendukung adalah capaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) Madrasah Aliyah sebesar 191,56% dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Agama Islam mencapai 139,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi masyarakat terhadap pendidikan agama dan pendidikan tinggi Islam mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi ini menandakan bahwa animo masyarakat untuk memasuki pendidikan tinggi agama sangat menggembirakan.

Selain yang dikemukakan di atas, berdasarkan hasil penilaian dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Penyelenggara Ujian Nasional menyatakan bahwa **“Hasil kelulusan Ujian Nasional (UN) siswa MTs Tahun 2012 mencapai (99,69%); lebih tinggi dibanding persentase kelulusan siswa SMP sederajat secara nasional (99,57%)”**.

Kelulusan UN MTs tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yaitu 99,67%. Capaian yang sama juga diraih oleh siswa MTs dilihat dari Nilai Murni, Persentase kelulusan UN siswa MTs dengan Nilai Murni 5,5 ke atas mencapai 92,29%; di atas kelulusan siswa SMP (91,37%); dan kelulusan secara nasional siswa SMP/MTs/Sederajat yaitu (91,37%).

Secara umum sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2012 telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang, di antaranya penyelesaian tindak lanjut temuan yang capaian targetnya hanya 47,20%. Hal ini terjadi karena frekuensi pemeriksaan/audit baik oleh APIP maupun BPK-RI meningkat sehingga konsentrasi para Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan fokus pada upaya menghadapi pelaksanaan pemeriksaan/audit dibanding waktu untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Selain hal tersebut, juga terdapat kendala dalam penyelesaian tindak lanjut, karena melibatkan pihak ketiga, antara lain penyelesaian temuan keuangan oleh rekanan, penyelesaian aset oleh Pemda setempat, pejabat/pegawai yang bertanggung untuk menyelesaikan tindak lanjut meninggal dunia, dan perusahaan yang bertanggung untuk menyelesaikan tindak lanjut mengalami pailit.

Dalam mewujudkan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2012 melalui 11 program menggunakan anggaran sebesar Rp36.866.982.236.505,00 atau 92,63%% dari pagu anggaran sebesar Rp39.800.553.390.785,00.

Secara keseluruhan capaian sasaran strategis Kementerian Agama sudah baik dan memuaskan, maka hasil yang diperoleh perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode tahun 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dan untuk Tahun 2014 Visi Indonesia adalah "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan"

Pada era penyelenggaraan pemerintahan 2010-2014, telah ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia telah memberikan tugas pokok kepada Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagaimana dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang optimal dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan maka seluruh instansi pemerintah menyusun rencana strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali sehingga di capai tujuan yang obyektif, terukur, dan tepat sasaran. Renstra dijabarkan lebih lanjut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap setahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan dievaluasi melalui penyusunan LAKIP.

UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka peranan LAKIP menjadi sangat strategis, sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 2005. Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*).

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan di pimpin oleh Menteri Agama.

### **2. Tugas Pokok**

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- 6) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

### C. Aspek strategis

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan 11 prioritas nasional yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan penanganan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas yang menjadi tanggung jawab dan terkait dengan tugas fungsi Kementerian Agama adalah prioritas bidang pendidikan dan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan. Selain itu Kementerian Agama juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

Berkaitan dengan pencapaian target prioritas dalam RPJMN Tahun 2010-2014, maka ditetapkan pokok-pokok strategi dan kebijakan Kementerian Agama Tahun 2010-2014 yang difokuskan pada 5 bidang yaitu:

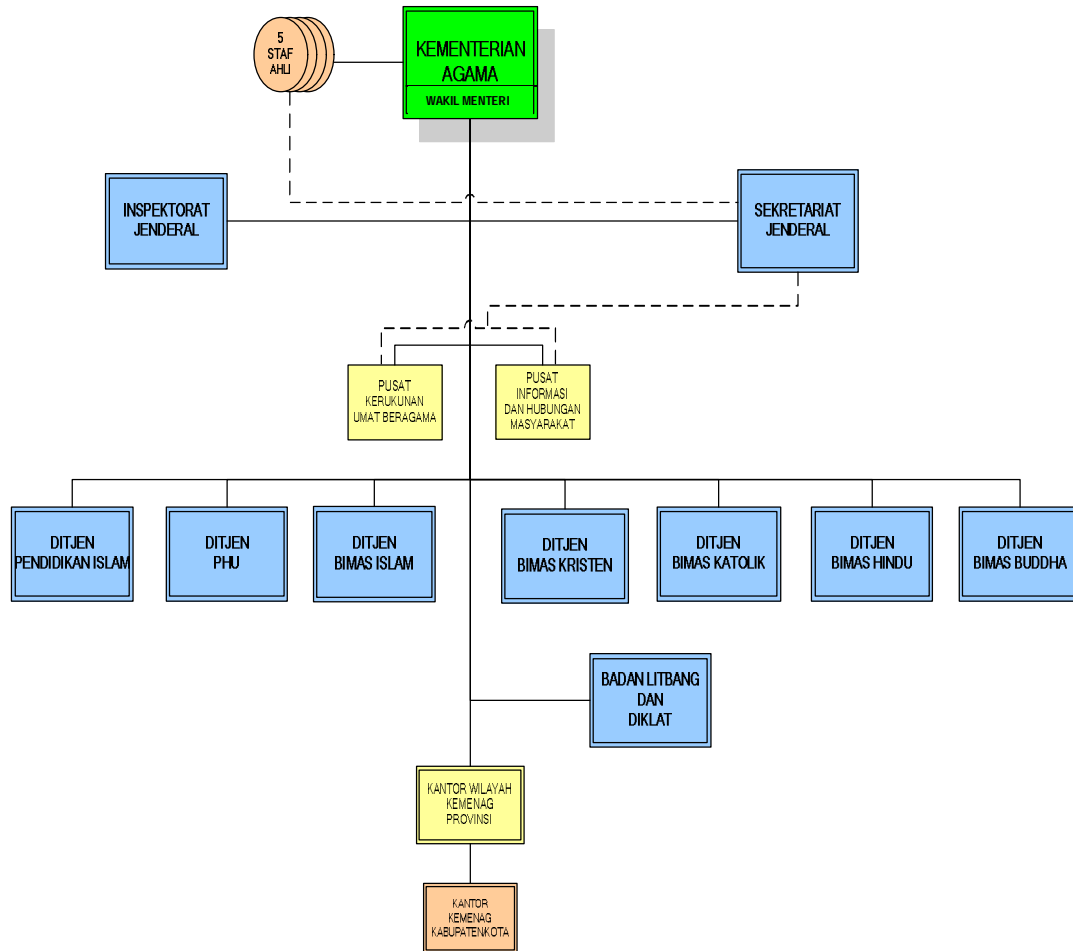
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, agar terwujud suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional;
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, agar terwujud kehidupan yang harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional;
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, agar terwujud pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, agar tercapainya tingkat kepuasan jemaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, agar terwujud penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional.

#### **D. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Menteri Agama dibantu oleh:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. Inspektorat Jenderal; dan
10. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Secara rinci dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Struktur Organisasi Kementerian Agama ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

#### E. Sistem Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama ini menyampaikan capaian kinerja Kementerian Agama Tahun 2012. Capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan perjanjian/penetapan kinerja yang ditargetkan tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Kementerian Agama. Analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan ini akan diketahui masalah atau kendala demi perbaikan kinerja di masa datang.



Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

**BAB I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis dan struktur organisasi Kementerian Agama.

**BAB II – Perencanaan dan Penetapan/Perjanjian Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Agama Tahun 2012 meliputi RPJMN 2010-2014, Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012.

**BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kementerian Agama dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012 yang dikaitkan dengan dukungan anggaran/keuangan.

**BAB IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa datang.

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN**  
**KINERJA**

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama, memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tugas dan tanggung jawab bidang agama diarahkan pada upaya pemerintah untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, landasan etika, pembinaan akhlak mulia dan menjadi orientasi dan motivasi bagi daya dorong umat dalam mewujudkan Indonesia yang religius, aman, damai dan sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kementerian Agama berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
2. Rencana Strategis Kementerian Agama 2010-2014
3. Penetapan Kinerja Tahun 2012

### **A. RPJMN 2010-2014**

RPJMN 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Kesejahteraan Rakyat**, terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. **Demokrasi**, terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia;
3. **Keadilan**, terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam Misi pembangunan 2010-2014. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu Terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Misi tersebut adalah 1) Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; 2) Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan 3) Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi; Agenda IV: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Kelima agenda tersebut memiliki prioritas yang dirumuskan dalam bentuk sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu: 1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; 2) Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi; dan 3) Sasaran Program Penegakan Hukum. Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda, sasaran pembangunan dan arah kebijakan umum pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan 11 (sebelas) Program Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektoral harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) bidang pembangunan yaitu: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Bidang Ekonomi; 3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Bidang Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Politik; 6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; 7) Bidang Hukum dan Aparatur; 8) Bidang Wilayah dan Tata ruang; serta 9) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat beberapa bidang yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama yaitu bidang (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin”** dengan melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama dengan dilakukan melalui empat fokus agenda prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010.

Keempat fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama; (b) peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik; (c) peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama; (d) peningkatan pendidikan dan pelatihan; dan (e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Arah kebijakan Kementerian Agama juga terkait erat dengan sasaran strategis nasional bidang pendidikan yang diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Selaras dengan

sasaran strategis nasional bidang agama dan pendidikan, kebijakan Kementerian Agama tahun 2010-2014 diarahkan kepada lima hal pokok, yaitu:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## **B. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Kementerian Agama yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Kementerian Agama beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan Presiden kepada Kementerian Agama.

Penyusunan Renstra Kementerian Agama mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Keagamaan. Disamping itu Kementerian Agama juga melaksanakan sebagian program pembangunan nasional di bidang pendidikan yaitu Raudhatul Athfal, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Bagian pokok rencana strategis kementerian menjabarkan arah kebijakan dan strategi kementerian yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk program jangka menengah yang hendak dicapai dan indikator pencapaiannya (*outcomes*), kegiatan strategis, keluaran (*output*); strategi implementasi dan pendanaan. Rencana Strategis Kementerian Agama 2010-2014 disusun berdasarkan kerangka logis dan alur berpikir, sebagaimana telah diuraikan tersebut. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antar unit-unit di bawah Kementerian Agama. Secara ringkas substansi Renstra Kementerian Agama dapat diilustrasikan sebagai berikut:

### **1. Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin”.

Visi ini sejalan dengan visi pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II 2009 – 2014 “Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan”

## 2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## 3. Tujuan

Tujuan jangka panjang pembangunan di bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah **“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang beragama, maju, sejahtera, dan cerdas, serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**.

## 4. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan dan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, selanjutnya Kementerian Agama menetapkan dan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahunan pada periode tahun 2010-2014 menurut lima bidang prioritas, yaitu: kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional;
- b. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional;
- c. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa;
- d. Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat;

- e. Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional.

Adapun lima sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Agama menurut lima bidang prioritas sebagai berikut:

**a. Bidang Kehidupan Beragama**

Sasaran strategis bidang kehidupan beragama adalah **“Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional”**, yang ditandai antara lain dengan: 1) Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang, moderat dan inklusif; 2) Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional; 3) Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama; 4) Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika; 5) Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa; 6) Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban; 7) Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan; 8) Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; 9) Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama; 10) Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama; dan 11) Meningkatnya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional).

**b. Bidang Kerukunan Umat Beragama**

Sasaran strategis bidang kerukunan umat beragama adalah **“Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional”** yang ditandai antara lain dengan: 1) Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; 2) Meningkatnya peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia Internasional; 3) Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama; 4) Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota; 5) Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan multikultural, gender, dan HAM; dan 6) Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama;



**c. Bidang Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**

Sasaran strategis bidang raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah **“Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa”**, yang ditandai antara lain dengan: 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ dan sejenisnya); 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustho yang bermutu; 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan Pesantren Salafiyah Ulya bermutu; 4) Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional di setiap provinsi; 5) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi agama; 6) Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama; 7) Tersedianya ma'had al jami'ah pada perguruan tinggi islam negeri; 8) Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 9) Tersedianya Ma'had Aly pada pondok pesantren; 10) Tersedianya layanan pendidikan non formal (Paket A, B, dan C) serta pendidikan vokasional pada pondok pesantren; 11) Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah; 12) Meningkatnya mutu pendidikan agama di sekolah; 13) Meningkatnya mutu, profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; 14) Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 15) Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat; 16) Tersedianya layanan pendidikan madrasah satu atap dan pesantren terpadu di wilayah perbatasan atau daerah khusus; dan 17) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

**d. Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Sasaran strategis penyelenggaraan ibadah haji adalah **“Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat”**, yang ditandai antara lain dengan: 1) Terwujudnya jamaah haji mandiri; 2) Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif; 3) Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji; 4) Terwujudnya sistem informasi yang handal; 5)

Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji; 6) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai; dan 7) Meningkatnya pengelolaan dana haji.

#### **e. Bidang Tata Kelola Pemerintahan**

Sasaran strategis bidang tata kelola pemerintahan adalah **“Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional”**, yang ditandai antara lain dengan: 1) Terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh baik di instansi pusat maupun daerah; 2) Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat dengan siklus minimal 5 (lima) tahunan; 3) Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 4) Terwujudnya struktur organisasi instansi pusat dan instansi vertikal Kementerian Agama yang sesuai dengan tuntutan perkembangan; 5) Menurunnya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal; 6) Meningkatnya recovery, revaluasi, pemanfaatan, dan kualitas pengelolaan aset; 7) Terbangunnya rintisan e-government dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan; 8) Meningkatnya kualitas aparatur sumberdaya manusia melalui sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional; 9) Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien; 10) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai basis kebijakan; dan 11) Terbangunnya citra positif Kementerian Agama sebagai institusi Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan kelima sasaran strategis jangka menengah tersebut, Kementerian Agama telah menetapkan berbagai kebijakan dan program dengan menetapkan indikator-indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut. Adapun program-program yang akan dilaksanakan Kementerian Agama sebagai berikut:

#### **a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama**

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai oleh program ini adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan Kementerian Agama. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut adalah:

- 1) Persentase SDM berkinerja sangat baik, dengan target sebesar 20% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014.
- 2) Rasio kecukupan anggaran, dengan target sebesar 79% pada tahun 2010 menjadi 99% pada tahun 2014.
- 3) Rasio ketersediaan sarana prasarana, dengan target sebesar 75% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014.
- 4) Persentase ketersediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2010 sebesar 50% dan diharapkan meningkat menjadi 100% pada tahun 2014.
- 5) Persentase ketersediaan Standar Prosedur Operasional (SPO). Target untuk tahun 2010 sebesar 50% dan ditargetkan meningkat menjadi 100% pada tahun 2014.
- 6) Persentase ketersediaan Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk, dengan target sebesar 10% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014.

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi Kementerian Agama. Hasil jangka menengah (*outcomes*) yang hendak dicapai melalui program ini adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program ini adalah meningkatnya rasio jumlah dan mutu sarana dan prasarana terhadap kebutuhan. Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah ketersediaan sarana adalah 90% pada tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014. Sedangkan target yang ditetapkan untuk rasio mutu adalah 40% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014. Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

#### **c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama**

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Hasil jangka menengah (*outcomes*) yang diharapkan dapat dicapai melalui program ini adalah: Pertama, meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan, yang diukur melalui penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan pada tahun 2010 ditargetkan hanya 25% dan diharapkan menurun hanya sebesar 5% pada tahun 2014. *Kedua*, meningkatnya mutu kinerja aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja (Sator/Satker) Kementerian Agama yang ditandai dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Tingkat mutu kinerja aparatur dan Sator/Satker Kementerian Agama ditargetkan sebesar 75% pada tahun 2010 dan diharapkan akan meningkat menjadi 95% pada tahun 2014. *Ketiga*, meningkatnya akuntabilitas kinerja Sator/Satker Kementerian Agama, yang diukur melalui penerapan 3 asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan target capaian kinerja sebesar 75% tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2014.

#### **d. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama**

Tujuan utama program ini adalah: 1) Menyediakan data dan informasi keagamaan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan pembangunan bidang agama; 2) Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Hasil (*outcomes*) yang hendak dicapai dari tujuan program ini adalah meningkatnya pengguna hasil penelitian dan pengembangan, sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta penyediaan informasi hasil penelitian dan pengembangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut adalah persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan dan program di unit kerja masing-masing, dan bagi masyarakat. Target capaian yang ditetapkan adalah meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian oleh pemerintah dan masyarakat, dengan target 20% tahun 2010 menjadi 60%

pada tahun 2014, terpenuhinya penyediaan data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun, serta tercapainya tingkat sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun. Berkenaan dengan tujuan kediklatan, hasil (outcomes) yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kinerja aparatur Kementerian Agama baik yang PNS maupun pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tersebut adalah persentase aparatur Kementerian Agama yang kompeten, profesional dan berintegritas. Target capaian yang ditetapkan adalah 30% tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014.

Sejalan dengan misi Kementerian Agama, maka fokus penelitian dan kediklatan diarahkan pada lima bidang prioritas, yaitu kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Unit organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program ini adalah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

**e. Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang ditandai dengan tingkat kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, sistem informasi yang memadai, serta tata kelola yang baik dan bersih. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program adalah (1) indeks kualitas pembinaan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (2) persentase indeks kualitas pelayanan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (3) indeks kualitas pengembangan informasi haji dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (4) indeks kualitas pembinaan umrah dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014. Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

**f. Program Pendidikan Islam**

Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 7,09% menjadi 7,65%, Madarasah Ibtidaiyah (MI) dari 13,44% menjadi 13,66%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 19,32% menjadi 21,41%, Madrasah Aliyah (MA) dari 7,35% menjadi 8,56%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi 0,69%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 2,26% menjadi 2,58%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,07% menjadi 0,11%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,27% menjadi 0,31% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 2,89% menjadi 3,50%.

Angka Partisipasi Murni (APM) juga diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 5,53% menjadi 5,97%, Madarasah Ibtidaiyah (MI) dari 10,55% menjadi 10,64%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 14,57% menjadi 14,93%, Madrasah Aliyah (MA) dari 5,97% menjadi 6,73%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,50% menjadi 0,62%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 1,66% menjadi 1,78%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,04% menjadi 2,20%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,06% menjadi 0,10%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,23% menjadi 0,27% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,48% menjadi 0,52%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 1,96% menjadi 2,88%.

Unit organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

#### **g. Program Bimbingan Masyarakat Islam**

Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan bimbingan masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen, maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan. Hasil (*outcomes*) yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat dengan ditandai (1) Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 35% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 70%

pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 20% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 15% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

#### **h. Program Bimbingan Masyarakat Kristen**

Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan Masyarakat Kristen. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

#### **i. Program Bimbingan Masyarakat Katolik**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bimbingan dan pendidikan agama Katolik. Hasil yang hendak dicapai oleh program ini adalah terwujudnya masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasila dalam Negara Kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Persentase kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2) Persentase kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Persentase kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

#### **j. Program Bimbingan Masyarakat Hindu**

Secara umum, program ini bertujuan terlaksananya dukungan Manajemen, Bimbingan dan Pendidikan Hindu. Hasil yang hendak dicapai program ini dalam jangka menengah adalah terwujudnya peningkatan signifikan kinerja yang

menjamin transparansi, akuntabilitas, kenaikan ketaatan beribadat dan kecerdasan serta sikap peserta didik pendidikan agama Hindu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah (1) Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

#### k. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Secara umum, program ini bertujuan terwujudnya penyelenggaraan dan kebijakan teknis dibidang masyarakat Buddha dan pendidikan agama Buddha. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, pengembangan potensi umat; dan pengembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah (1) Meningkatnya kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, (4) Meningkatnya kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Renstra Kementerian Agama Tahun 2010-2014 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1

#### Renstra Kementerian Agama Tahun 2010-2014

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
<b>Program 1 : Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>	
<b>Sasaran Strategis<sup>1</sup> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. % SDM berkinerja sangat baik</li> <li>2. Rasio kecukupan anggaran</li> <li>3. Rasio ketersediaan Sarana prasarana</li> </ol>



Sasaran	Indikator Kinerja Utama
dukungan administrasi kepada semua unit organisasi	4. SPM & SPO
<b>Program 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama</b>	
<b>Sasaran Strategis 2</b> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama	1. Rasio ketersediaan sarana prasarana terhadap kebutuhan 2. Sarana prasarana bermutu
<b>Program 3 : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama</b>	
<b>Sasaran Strategis 3</b> Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan	1. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan
<b>Sasaran Strategis 4</b> Meningkatnya mutu kinerja aparatur	2. Penilaian efektivitas, efisiensi dan ekonomis
<b>Sasaran Strategis 5</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja sator/satker Kementerian Agama	3. Penerapan 3 prinsip akuntabilitas: Transparansi, partisipasi dan akuntabel
<b>Program 4 : Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama</b>	
<b>Sasaran Strategis 6</b> Meningkatnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan oleh pemerintah dan masyarakat	1. Tingkat penggunaan hasil penelitian dan pengembangan oleh pemerintah dan masyarakat
<b>Sasaran Strategis 7</b> Meningkatnya penyediaan informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan	2. Persentase penyediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan
<b>Sasaran Strategis 8</b> Meningkatnya sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan	3. Tingkat Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan
<b>Sasaran Strategis 9:</b> Meningkatnya kinerja aparatur Kementerian Agama	4. Persentase aparatur Kementerian Agama yang kompeten, profesional dan berintegritas
<b>Program 5 : Penyelenggaraan Haji dan Umrah</b>	
<b>Sasaran Strategis 10</b> Meningkatnya kualitas pembinaan Pelayanan dan pengembangan sistem informasi haji dan umarah	1. Indeks kualitas pembinaan
	2. Indeks kualitas pelayanan
	3. Indeks kualitas pengembangan informasi haji
	4. Indeks kualitas pembinaan umrah
<b>Program 6 : Pendidikan Islam</b>	
<b>Sasaran Strategis 11</b> Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing Pendidikan Islam	1. APK Lembaga Pendidikan Islam
	- RA/BA
	- MI
	- MTs.
	- MA
	- Pesantren Salafiyah Ula - Pesantren Salafiyah Wustha - TPQ

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
	- Kelompok Belajar Paket A
	- Kelompok Belajar Paket B
	- Kelompok Belajar Paket C
	- PTAI
	2. APM Lembaga Pendidikan Islam
	- RA/BA
	- MI
	- MTs.
	- MA
	- Pesantren Salafiyah Ula
	- Pesantren Salafiyah Wustha
	- TPQ
	- Kelompok Belajar Paket A
	- Kelompok Belajar Paket B
- Kelompok Belajar Paket C	
<b>Sasaran Strategis 12</b> <b>Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu PAUD</b>	3. Persentase Provinsi Mencapai APK PAUD Minimal 60 %
	4. Persentase Kabupaten Mencapai APK PAUD Minimal 50 %
	5. Persentase Kota Mencapai APK PAUD Minimal 90 %
	6. Rasio Jumlah Peserta Didik PAUD Perempuan:Laki-laki
<b>Sasaran Strategis 13</b> <b>Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MI/PPs Ula, Paket A pada Pontren</b>	7. Persentase Provinsi di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan Tingkat Literasi 92 %
	8. Persentase Provinsi di Nusa Tenggara dengan Tingkat Literasi 90 %
	9. Persentase Provinsi di Papua dengan Tingkat Literasi 91 %
	10. Persentase Prov. di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD ber APM MI 97 %
	11. Persentase Prov di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD ber APM MI 90 %
	12. Persentase Kabupaten ber APM MI 80 %
	13. Persentase Kota ber APM MI 98 %
	14. Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki-laki
	15. Prosentase Peserta Didik Putus Sekolah
	16. Persentase lulusan MI/PPS Ula/Paket A melanjutkan pendidikan
	17. Persentase MI/PPS Ula Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
	18. Persentase Kabupaten/Kota Memiliki MI/RSBI/SBI
	19. Persentase Guru MI/PPS Ula Lulus Pelatihan Literasi Komputer
	20. Persentase Tutor Paket A di Pesantren Lulus Pelatihan Literasi Komputer
	21. Persentase Siswa MI/PPS Ula/Paket A di

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
	Pesantren Berkompetensi Literasi Komputer 22. Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak dan Perunggu dari Kompetisi Internasional 23. Peringkat Hasil Tes PIRLS Peserta Didik Kelas 4 24. Prosentase MI Negeri yang Masih Melakukan Pungutan BOP 25. Prosentase MI/PPS Ula/Paket A di Pesantren Swasta Penerima BOS yang Masih Memungut Lebih Besar dari Unit Cost BOS per Bulan 26. Prosentase Penyelenggara Program Paket A di Pesantren yang Masih Melakukan Pungutan BOP
<b>Sasaran Strategis 14</b> <b>Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren</b>	27. Persentase Provinsi Ber-APK 90 % 28. Persentase Provinsi di Sumatra, Sulbar, Papua Barat, Maluku, dan NAD Ber-APM 90 % 29. Persentase Kabupaten Ber-APK 50 % 30. Persentase Kota Ber-APK 115 % 31. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki 32. Persentase Peserta Didik Putus Sekolah 33. Persentase PPS Wustha Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B 34. Persentase Program Paket B Berakreditasi 35. Persentase Kabupaten/Kota memiliki MTs SBI 36. Persentase Guru MTs/ PPS Wustha/Paket B di Pesantren Berkualifikasi S1/D4 37. Persentase Guru MTs/PPS Wustha/Paket B di Pesantren Bersertifikat 38. Persentase Guru MTs/PPS Wustha/Paket B di Pesantren Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK 39. Persentase Tutor Paket B Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK 40. Persentase MTs/PPS Wustha/ Paket B di pesantren yang Memiliki Perpustakaan, Lab. IPA, Lab. Bahasa, dan Lab. Multimedia, Serta Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Siswa 41. Rerata Nasional Nilai UN 42. Prosentase Peserta Didik MTs/ PPS Wustha SBI Meraih Skor TOEIC/Institutional TOEIC 350 atau Ekuivalensinya. 43. Nilai Total Tertimbang Medali dari

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
	Kompetisi Internasional
	44. Prosentase Madrasah menerapkan kurikulum terbaru
	45. Prosentase Madrasah menerapkan metodologi pembelajaran holistik dan <i>integrated</i>
	46. Prosentase MTs Negeri yang Tidak Melakukan Pungutan BOP 100 %
	47. Prosentase MTs/PPS Wustha/Paket B Swasta Penerima BOS yang Masih Memungut Lebih Besar dari Unit Cos BOS per Bulan
	48. Prosentase Penyelenggara Program Paket B di Pesantren yang Masih Melakukan Pungutan BOP
<b>Sasaran Strategis 15</b> <b>Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu Pendidikan Menengah</b>	49. APK Nasional
	50. Prosentase Provinsi Ber-APK 70 %
	51. Prosentase Kabupaten Ber-APK 60 %
	52. Prosentase Kota Ber-APK 95 %
	53. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki
	54. Persentase MA Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B
	55. Persentase Program Paket C Berakreditasi
	56. Persentase Kabupaten/Kota Memiliki MA SBI
	57. Persentase Tutor Paket C Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK
	58. Prosentase Peserta Didik MA SBI Meraih Skor TOEFL/Institutional TOEFL 400 atau Ekuivalensinya
	59. Prosentase MA /Paket C di Pesantren Bersertifikat Kompetensi
	60. Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional
	61. Prosentasi Lulusan MA yang Diterima PT Pada Tahun Kelulusan
	62. Prosentase Lulusan MA Bekerja Pada Tahun Kelulusan
	63. Prosentase MA Bersertifikat ISO 9001:2008
	64. Jumlah MA SBI Bersertifikat ISO 9001:2008
<b>Sasaran Strategis 16</b> <b>Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Islam</b>	1. Prosentase Prodi Berakreditasi
	2. Prosentase Prodi Berakreditasi Minimal B
	3. Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional
	4. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki-laki pada PTA
<b>Program 7 : Bimbingan Masyarakat Islam</b>	
<b>Sasaran Strategis 17</b> <b>Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan , dan pengembangan potensi umat</b>	1. Indeks kualitas bimbingan
	2. Indeks kualitas pelayanan
	3. Indeks kualitas pemberdayaan
	4. Indeks kualitas pengembangan

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
<b>Program 8 : Bimbingan Masyarakat Kristen</b>	
<b>Sasaran Strategis 18</b> Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen	1. Indeks kualitas bimbingan
	2. Indeks kualitas pelayanan
	3. Indeks kualitas pemberdayaan
	4. Indeks kualitas pengembangan
<b>Program 9 : Bimbingan Masyarakat Katolik</b>	
<b>Sasaran Strategis 19</b> Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik	1. Indeks kualitas bimbingan
	2. Indeks kualitas pelayanan
	3. Indeks kualitas pemberdayaan
	4. Indeks kualitas pengembangan
<b>Program 10 : Bimbingan Masyarakat Hindu</b>	
<b>Sasaran Strategis 20</b> Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu	1. Indeks kualitas bimbingan
	2. Indeks kualitas pelayanan
	3. Indeks kualitas pemberdayaan
	4. Indeks kualitas pengembangan
<b>Program 11 : Bimbingan Masyarakat Buddha</b>	
<b>Sasaran Strategis 21</b> Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha	1. Indeks kualitas bimbingan
	2. Indeks kualitas pelayanan
	3. Indeks kualitas pemberdayaan
	4. Indeks kualitas pengembangan

## 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sejak Renstra Kementerian Agama periode Tahun 2010-2014 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, IKU Kementerian Agama belum ditetapkan dengan surat keputusan Menteri. Sesuai dengan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010, IKU dipergunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis Kementerian Agama. IKU/Indikator yang termuat dalam Renstra masih terbatas mengukur keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Namun indikator-indikator outcome dari sasaran strategis program yang termuat dalam Renstra telah dipergunakan sebagai IKU pencapaian Program dalam penganggaran/DIPA/RKA-KL. Mengingat pada awal pelaksanaan Renstra Kementerian Agama mengalami kesulitan dalam mengukur capaian sasaran prioritas/strategis Kementerian Agama yang akan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, maka pada Tahun 2011 Kementerian Agama berupaya menyusun IKU yang mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan Renstra. Draft IKU Kementerian Agama tersebut telah dibahas secara simultan dan dipresentasikan dihadapan Pakar dari MENPAN dan RB dihadiri Unit Eselon I Pusat serta unit kerja terkait. Adapun IKU Kementerian Agama yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor Tahun 2011, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2

## Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
I.	Terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama</li> <li>2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama</li> <li>3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama</li> <li>4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat Islam</li> </ol>
II.	Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk;</li> <li>2. Pemulihan/penyelesaian pasca konflik inter dan antar agama.</li> </ol>
III.	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Partisipasi Murni (APK) Pendidikan Agama dan Keagamaan;</li> <li>2. Angka Partisipasi Kasar (APM) Pendidikan Agama dan Keagamaan</li> <li>3. Rerata Nasional Nilai UN</li> </ol>
IV.	Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase peningkatan kualitas pelayanan haji</li> <li>2. Persentase peningkatan pengembangan informasi haji</li> </ol>
V.	Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase SDM berkinerja sangat baik</li> <li>2. Persentase ketersediaan SPM &amp; SPO</li> <li>3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</li> <li>4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan</li> <li>5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan</li> <li>6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.</li> </ol>

### C. Penetapan Kinerja (PK)

Kementerian Agama telah membuat penetapan kinerja tahun 2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kementerian Agama serta RPJMN tahun 2010-2014. Oleh

karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kementerian yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2010-2014. Penetapan Kinerja Tingkat Kementerian Agama Tahun 2012 yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2012 sebagai berikut:

Tabel 3  
Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012  
(Sebelum perubahan)

<b>Program 1 : Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>	
<b>Sasaran Strategis 1</b>	
<b>Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian dukungan manajemen pada setiap unit organisasi dari pusat sampai daerah</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1 Persentase SDM berkinerja sangat baik	40%
2 Rasio kecukupan anggaran	85%
3 Rasio ketersediaan sarana prasarana	85%
4 Persentase unit eselon II yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	65%
5 Persentase unit eselon II yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	65%
6 Ketersediaan sekretariat bersama terhadap kebutuhan kerukunan umat beragama	40%
7 Tersedianya bantuan operasional forum KUB pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia	90%
8 Persentase peningkatan pelayanan pendidikan agama dan keagamaan khonghucu	100%
9 Persentase Aparatur Kementerian Agama yang kompeten, profesional dan berintegritas	60%
<b>Program 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama</b>	
<b>Sasaran Strategis 2</b>	
<b>Meningkatnya mutu dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi Kementerian Agama</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1. Rasio kecukupan sarana dan prasarana	95%
2. Rasio mutu sarana dan prasarana	50%
<b>Program 3: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama</b>	
<b>Sasaran Strategis 3</b>	

<b>Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1 Persentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan	5%
2 Persentase penurunan jumlah kerugian negara	5%
3 Persentase penurunan jumlah pengaduan masyarakat	5%
4 Persentase tercapainya opini WTP dari BPK terhadap LK Kementerian Agama	80%
<b>Sasaran Strategis 4</b>	
<b>Meningkatnya mutu kinerja aparatur</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1 Persentase efektivitas pencapaian kinerja aparatur	80%
2 Persentase efisiensi pencapaian kinerja aparatur	80%
3 Persentase pencapaian kinerja aparatur yang ekonomis	80%
<b>Sasaran Strategis 5</b>	
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi /Satuan Kerja Kementerian Agama</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1 Persentase peningkatan transparansi tatakelola pemerintahan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	25%
2 Persentase partisipasi stakeholders dalam pelaksanaan tugas	100%
3 Persentase peningkatan pertanggungjawaban kinerja ( <i>performance accountability</i> ) kegiatan, anggaran, sumber daya, dan waktu pelaksanaan	25%
<b>Program 4: Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama</b>	
<b>Sasaran Strategis 6</b>	
<b>Meningkatnya ketersediaan hasil litbang kehidupan keagamaan sebagai bahan kebijakan pimpinan</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1 Jumlah hasil penelitian di bidang kehidupan keagamaan	79 rekomendasi kebijakan
2 Jumlah hasil pengembangan di bidang kehidupan keagamaan	37 dokumen
<b>Sasaran Strategis 7</b>	
<b>Meningkatnya ketersediaan hasil litbang pendidikan agama dan keagamaan sebagai bahan kebijakan pimpinan</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>



1	Jumlah hasil penelitian di bidang pendidikan agama dan keagamaan	103 rekomendasi kebijakan
2	Jumlah hasil pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan	56 dokumen
<b>Sasaran Strategis 8</b>		
<b>Meningkatnya ketersediaan hasil litbang lektur dan khazanah keagamaan sebagai bahan kebijakan pimpinan</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>
1	Jumlah hasil penelitian di bidang lektur dan khazanah keagamaan	95 rekomendasi kebijakan
2	Jumlah hasil pengembangan di bidang lektur dan khazanah keagamaan	19 dokumen
<b>Sasaran Strategis 9</b>		
<b>Meningkatnya kesempatan diklat bagi tenaga administrasi Kementerian Agama</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>
1	Jumlah peserta diklat tenaga administrasi	873 angk (26.193 org)
2	Jumlah hasil pengembangan diklat tenaga administrasi	63 rekomendasi/dokumen
<b>Sasaran Strategis 10</b>		
<b>Meningkatnya kesempatan diklat bagi tenaga teknis pendidikan dan keagamaan Kementerian Agama</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>
1	Jumlah peserta diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan	1308 angkatan (39.237 orang)
2	Jumlah hasil pengembangan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan	92 rekomendasi/dokumen
<b>Sasaran Strategis 11</b>		
<b>Meningkatnya kualitas pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan Mushaf Al-Qur'an</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>
1	Jumlah pentashihan Mushaf Al-Qur'an	99 naskah (11 kegiatan)
2	Jumlah pengkajian Mushaf Al-Qur'an	3 naskah, 7 tema dan 15 juz braille
<b>Program 5: Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>		

<b>Sasaran Strategis 12</b>		
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>
1	Persentase peningkatan kualitas pembinaan haji dan umrah	40%

2	Persentase peningkatan kualitas pelayanan haji	40%
3	Persentase peningkatan pengembangan informasi haji	40%
4	Persentase peningkatan kualitas pembinaan umrah	40%
<b>Program 6: Program Pendidikan Islam</b>		
<b>Sasaran Strategis 13</b>		
<b>Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing Pendidikan Islam</b>		
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan /agama Islam	100%
2	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	100%
3	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	100%
4	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	100%
5	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	100%
<b>Program 7: Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>		
<b>Sasaran Strategis 14</b>		
<b>Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat</b>		
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Jumlah layanan kepenghuluan dan pemberdayaan KUA	80%
2	Persentase peningkatan pembinaan keluarga sakinah	80%
3	Persentase peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masjid	80%
4	Persentase peningkatan sertifikasi dan registrasi produk halal	80%
5	Persentase peningkatan penyuluhan produk halal dan pengawasan	80%
6	Persentase peningkatan kegiatan laboratorium produk halal	80%
7	Persentase peningkatan pembinaan syariah dan hisab ruyat	80%
8	Persentase peningkatan layanan tata usaha Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan syariah	80%
9	Persentase peningkatan kemitraan dan kerjasama kelembagaan ormas Islam	80%
10	Persentase peningkatan pembinaan tokoh agama Islam dan pemuka agama.	80%
11	Persentase peningkatan kualitas MTQ/STQ tingkat nasional dan internasional	90%
12	Persentase peningkatan pembinaan Qari/Qari'ah, Hafiz/Hafizah	80%
13	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan LPTQ	80%
14	Persentase peningkatan ketersediaan tenaga publisi dakwah Profesional	80%

15	Terselenggaranya HBI tingkat kenegaraan dan HBI pada masyarakat	80%
16	Persentase peningkatan terlaksananya pengembangan lembaga seni budaya Islam	80%
17	Persentase peningkatan bantuan pustaka keagamaan	80%
18	Persentase ketersediaannya tenaga penyuluh agama Islam	80%
19	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh agama Islam	80%
20	Persentase peningkatan bantuan pengembangan bagi lembaga sosial keagamaan	80%
21	Persentase peningkatan koordinasi bidang penerangan agama Islam	80%
22	Persentase peningkatan penyelenggaraan ketatausahaan pemberdayaan penais	80%
23	Persentase ketersediaan dokumen ketatausahaan	80%
24	Persentase peningkatan ketersediaan dokumen penyuluh zakat (sistem informasi zakat)	80%
25	Persentase ketersediaan dokumen bina lembaga zakat (pemberdayaan lembaga zakat)	80%
26	Persentase peningkatan terbinanya lembaga keagamaan bidang bina lembaga zakat	80%
27	Persentase peningkatan ketersediaan dokumen pengelolaan zakat (penyuluhan zakat)	80%
28	Persentase terbinanya lembaga keagamaan bidang pengelola zakat	80%
29	Persentase ketersediaan dokumen ibadah sosial (pengawasan lembaga zakat)	80%
30	Persentase terbinanya lembaga keagamaan bidang ibadah sosial	80%
31	Persentase peningkatan pelayanan sistem informasi wakaf	80%
32	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan dan kerjasama wakaf	80%
33	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi dan mutasi wakaf	80%
34	Persentase peningkatan pembinaan nazhir dan lembaga wakaf	80%
<b>Program 8: Program Bimbingan Masyarakat Kristen</b>		
<b>Sasaran Strategis 14</b>		
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>
1	Jumlah Penyuluh Non PNS Terbina	100 Org (1 Kgt)
2	Jumlah SDM Gereja Terbina	512 Org (4 Kgt)
3	Jumlah Penyiaran Mimbar Agama Kristen di TV	6 Pkt
4	Jumlah Bantuan Sosial Penyuluh Non PNS	500 Org
5	Jumlah Exp Pencetakan Brosur Penyuluhan	2000 Exp
6	Pencetakan Buku Pedoman Penyuluh	1 Pkt
7	Jumlah Dokumen Layanan dan Penyelesaian Tugas	8 Dok

8	Jumlah Bantuan Sosial Lembaga Keagamaan	35 Lbg
9	Jumlah Bantuan Sosial Gereja	34 Lbg
10	Jumlah Bantuan Kitab Suci dan Nyanyian Rohani	2 Pkt
11	Jumlah SDM Gereja Terbina	762 Org (10 Kgt)
12	Jumlah Bantuan Sosial Sekolah Minggu	60 Lks
13	Pencetakan Buku Pedoman Kelembagaan	1 Pkt
14	Jumlah Dokumen Layanan dan Penyelesaian Tugas	8 Dok
15	Jumlah SDM LPPN/LPPD Terbina	129 Org (1 Kgt)
16	Jumlah SDM Paduan Suara Gerejawi Terbina	205 Org (2 Kgt)
17	Jumlah Bantuan Penyelenggr. Pesparawi XII	1 Lks
18	Pencetakan Buku Pedoman Seni-Budaya	1 Pkt
19	Pencetakan Dokumen Layanan dan Penyelesaian Tugas	8 Dok
20	Jumlah SDM Guru dan Tenaga Kependidikan Terbina	
21	Jumlah Bantuan Buku Tingkat Dasar	1359 Org (12 Kgt)
22	Jumlah Guru Tersertifikasi	4 Pkt
23	Jumlah Bantuan Beasiswa S1 Guru dan Pegawai	1000 Org
24	Jumlah Bantuan KKG PAK	1233 Org
25	Jumlah Dokumen Layanan dan Penyelesaian Tugas	25 Lks
26	Jumlah SDM Guru Bidang Studi Terbina	
27	Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2012	544 Org (5 Kgt)
28	Jumlah Bantuan Buku Tingkat Menengah	1 Kgt
29	Jumlah Bantuan untuk MGMP PAK	4 Pkt
30	Jumlah Bantuan Operasional SMTK	10 Lks
31	Jumlah Dokumen Layanan dan Penyelesaian Tugas	120 Lks
32	Jumlah SDM PTT/AK Terbina	
33	Jumlah Bantuan Beasiswa Dosen S2	404 Org(4 Kgt)
34	Jumlah bantuan Beasiswa Dosen S3	581 Org
35	Jumlah Bantuan Buku Tingkat Tinggi	78 Org
36	Jumlah Bantuan Dosen Tidak Tetap	6 Pkt
37	Jumlah Bantuan Dosen Non PNS	100 Org
38	Jumlah Bantuan Sosial PTT/AK	26 Org
39	Jumlah Bantuan Mahasiswa Miskin Berprestasi	73 Lks
40	Jumlah Dokumen Layanan dan Penyelesaian Tugas	1000 Org
41	Jumlah SDM Pusat dan Daerah Terbina	2080 Org (22 Kgt)
42	Jumlah Dokumen Layanan dan Penyelesaian Tugas	101 Dok

### Program 9: Program Bimbingan Masyarakat Katolik

#### Sasaran Strategis 16

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik

	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Pengawas yang terbina	171 orang

2	Jumlah Guru Agama Katolik yang terbina	620 orang
3	Jumlah Dosen yang terbina	105 orang
4	Jumlah pegawai yang terbina	100 orang
5	Jumlah Lembaga/ Majelis yang dibantu	25 lembaga
6	Jumlah Paroki yang dibantu	50 paroki
7	Jumlah Gereja Katolik yang dibantu	87 gereja
8	Jumlah Penyuluh/ Juru Penerang yang dibina	355 orang
9	Jumlah Tokoh Agama Katolik yang dibina	239 orang
10	Jumlah buku keagamaan yang tersalurkan	120.000 eks

### Program 10: Program Bimbingan Masyarakat Hindu

#### Sasaran Strategis 17

#### Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu

Indikator Kinerja		Target
1	Jumlah guru/pengawas yang disertifikasi	900 orang
2	Jumlah bantuan beasiswa bagi Pegawai/Guru/Dosen berprestasi	67 Orang
3	Jumlah guru yang dikualifikasi pendidikannya	464 Orang
4	Jumlah guru yang diberikan pembinaan kompetensi profesi	150 Orang
5	Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi sertifikasi	750 orang
6	Jumlah guru pasraman yang diberikan bantuan	225 Orang
7	Jumlah dosen/mahasiswa yang mendapat beasiswa luar negeri	3 Orang
8	Jumlah alat pengolahan data yang diadakan	10 Unit
9	Jumlah mobil yang diadakan sebagai sarana memperlancar pelaksanaan tugas	4 Unit
10	Jumlah buku pelajaran yang diadakan	84.000 Exp.
11	Jumlah buku bacaan yang diadakan	37.700 Exp.
12	Presentase jumlah dosen yang mengikuti penelitian	30 Orang
13	Jumlah alat media pendidikan Agama dan Keagamaan yang diadakan	6.210 Set
14	Jumlah lembaga mahasiswa hindu (BEM, KMHD) yang diberikan bantuan	20 Lokasi
15	Jumlah naskah ujian negara Perti Hindu	1 Paket
16	Jumlah Kegiatan pameran pendidikan keagamaan Hindu	2 kali
17	Jumlah Perguruan Tinggi Hindu yang diberikan bantuan operasional	5 Lokasi
18	Jumlah Perguruan Tinggi Hindu swasta yang diberikan bantuan sarana pendidikan	8 Lokasi
19	Jumlah lembaga-lembaga Agama dan Keagamaan yang diberikan pembinaan	36 Lokasi
20	Jumlah yang diberikan bantuan KKG, MGMP	40 Lokasi
21	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti PTJJ	132 Orang
22	Jumlah bantuan rehab pasraman Tk. Paud, Tk. Dasar dan Tk. Menengah	120 Lokasi
23	Jumlah Perguruan Tinggi hindu swasta yang diberikan	7 Lokasi

	bantuan persiapan Temu Karya Ilmiah	
24	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang diberikan pendidikan pesraman kilat	33 Propinsi
25	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang diberikan BOP	132 Lokasi
26	Jumlah Mahasiswa Hindu yang diberikan bantuan	600 orang
27	Jumlah Lembaga keagamaan yang diberikan bantuan	112 Lembaga
28	Jumlah tempat ibadah yang diberikan bantuan rehab.	62 Lokasi
29	Jumlah tanah pura yang disertifikasi	10 Lokasi
30	Rasio jumlah kalender per satuan penduduk Umat Hindu yang diadakan	4.100 Exp.
31	Persentase jumlah umat dengan kitab suci dan buku keagamaan yang diadakan (1 (satu) kitab suci dan buku keagamaan per KK)	17.000 Exp.
32	Jumlah kunjungan pembinaan pada Hari Raya Nyepi	10 Lokasi
33	Jumlah pelayanan kehidupan beragama bagi Umat Hindu	14 kali
34	Jumlah alat kebudayaan dan kesenian keagamaan Hindu yang diadakan	453 Set
35	Jumlah layanan dalam kegiatan koordinasi UDG	3 Kali
36	Jumlah Bantuan Oprasional bagi Penyuluh Hindu	150 orang
37	Jumlah Bantuan kendaraan roda dua untuk penyuluh	25 Lokasi
38	Jumlah pameran keagamaan Hindu yang diadakan	2 Kali
39	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan/koordinasi/ monitoring dan pelaporan	20 lokasi
40	Monitoring dan Pelaporan	20 Lokasi
41	Jumlah layanan informasi keagamaan Hindu	19 Kali
42	Jumlah Juklak dan Juknis yang disusun	9 Juklak
43	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 Bln
44	Jumlah biaya penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran	12 Bln
45	Jumlah Dokumen Perencanaan, Ortala dan Kepegawaian, Keuangan yang telah diselesaikan	11 Kali
46	Jumlah layanan Pembinaan dan bimbingan yang diberikan pembinaan	12 Prov
47	Jumlah Penyelenggaraan Humas, Protokol dan pemberitaan	13 Keg
48	Jumlah Pelayanan Publik yang diselesaikan	8 Keg

### Program 10: Program Bimbingan Masyarakat Buddha

#### Sasaran Strategis 18

#### Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan buddha

	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Tenaga Teknis Keagamaan Budha yang terbina	4818 orang
2	Jumlah Lembaga Keagamaan Budha yang terbina	734 Lembaga

3	Jumlah Upacara Keagamaan Budha yang meningkat	4 Event
4	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang meningkat	3556 orang
5	Jumlah Lembaga Kependidikan yang Terbina	688 Lembaga
6	Jumlah peserta didik yang terbina	450 orang

Mengingat Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 tersebut di atas belum memenuhi kriteria dalam Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010, yaitu: sasaran strategis Kementerian adalah outcome dan indikator kinerja harus relevan untuk mengukur sasaran strategis Kementerian Agama ataupun berdasarkan IKU, maka Penetapan Kinerja perlu disempurnakan. Sehingga diharapkan Penetapan Kinerja Kementerian Agama yang sudah disempurnakan ini dapat dimanfaatkan dalam memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, pelaporan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja, dan menilai keberhasilan Kementerian Agama. Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 disempurnakan dengan tetap memperhatikan dokumen Renstra, RKT, dan dokumen penganggaran/ pelaksanaan anggaran (DIPA). Adapun Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 yang sudah disempurnakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012  
(setelah perubahan)

Sasaran Strategis 1	
Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional	
Indikator Kinerja	Target
1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama	55%
2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama	50%
3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	40%
4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama	35%
Sasaran Strategis 2	
Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional	
Indikator Kinerja	Target
1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk;	15 lembaga
2. Pemulihan Pasca konflik	1 kegiatan

<b>Sasaran Strategis 3</b>	
<b>Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1. APK Lembaga Pendidikan Islam	
- MI	13,55%
- MTs.	20,22%
- MA	7,35%
- Pesantren Salafiyah Ula	0,63%
- Pesantren Salafiyah Wustha	2,42%
- Kelompok Belajar Paket A	0,09%
- Kelompok Belajar Paket B	0,29%
- Kelompok Belajar Paket C	0,59%
- PTAI	2,89%
2. APM Lembaga Pendidikan Islam	
- PTAI	2,35%
3. Rerata Nasional Nilai UN Madrasah	8.00
<b>Sasaran Strategis 3</b>	
<b>Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1. Indeks kualitas pelayanan	50%
2. Indeks kualitas pengembangan informasi haji	50%
<b>Sasaran Strategis 5</b>	
<b>Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1. % SDM berkinerja sangat baik	40%
2. Persentase ketersediaan SPM & SPO	80%
3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP
4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan	33 provinsi
5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan	15%
6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.	90%



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis Kementerian Agama memang tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka yang bersifat kualitatif. Dari lima sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, tiga diantaranya mencakup dimensi pembangunan manusia dan perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan proses dan waktu dalam pencapaiannya. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2012 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5  
Tingkat Capaian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012

Sasaran Strategis 1			
Terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama	43%	41,52%	96,56%
2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama	45%	43,70%	97,11%
3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	31%	28,10%	90,65%
4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama	34%	31,8%	93,53%
<b>Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1</b>			<b>94,46%</b>

<b>Sasaran Strategis 2</b>			
<b>Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk;	15 lembaga	15 lembaga	100%
2. Pemulihan Pasca konflik	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2			100%
<b>Sasaran Strategis 3</b>			
<b>Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. APK Lembaga Pendidikan Islam			
- MI	13,55%	10,65%	78,60%
- MTs	20,22%	18,64%	92,19%
- MA	7,35%	14,08%	191,56%
- PTAI	2,89%	3,28%	113,49%
2. APM Lembaga Pendidikan Islam			
- PTAI	2,35%	3,28%	139,57%
3. Rerata Nasional Nilai UN	8.00%	7,95%	99,37%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3			119,13%
<b>Sasaran Strategis 4</b>			
<b>Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Indeks kualitas pembinaan dan pelayanan haji dan umrah	50%	50%	100%
2. Indeks kualitas pengembangan informasi haji	50%	50%	100%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4			100%

<b>Sasaran Strategis 5</b>			
<b>Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. % SDM berkinerja sangat baik	40%	38,80%	97%
2. Persentase ketersediaan SPM & SPO	80%	70%	87,50%
3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP	WTP(DPP)	95%
4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan	33 provinsi	33 provinsi	100%
5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan	15%	12%	120%
6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.	90%	42,47%	47,19%
<b>Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 5</b>			<b>91,11%</b>
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>			<b>100,94%</b>

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
<b>Terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional</b>			
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama	43%	41,52%	96,56%
2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama	45%	43,70%	97,11%
3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	31%	28,10%	90,65%
4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama	34%	31,80%	93,53%
<b>Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1</b>			<b>94,46%</b>

n

- a. Analisis capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:  
Capaian target kinerja sasaran strategis 1 (satu) yaitu terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional tahun 2012 sudah cukup baik yaitu 94,46%. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini semuanya tercapai dengan baik yaitu diatas 90%, indikator capaian tertinggi terdapat pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama yaitu 97,11%, sedang terendah pada indeks kualitas pemberdayaan umat beragama dengan capain target sebesar 90,65%.
- b. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### **1) Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama**

Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama yang semula ditargetkan sebesar 43% dapat direalisasikan 41,52%, meskipun tidak mencapai target yang diharapkan namun capaian target indikator kinerja ini sudah cukup baik yaitu sebesar 96,56%. Jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 93,70%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 2,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman keagamaan umat beragama sebagai landasan etika dan moral baik secara individual maupun secara bersama dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin meningkat; juga semakin berkembangnya pola keberagaman yang moderat dan inklusif, saling menghargai dan menghayati kemajemukan. Peningkatan capaian target indikator ini dapat ditandai dengan semakin meningkatnya indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama Islam sebesar 94,54%, Kristen 92%, Katolik 100%, Hindu 92%, dan terhadap umat Buddha 100%. Meningkatnya kualitas bimbingan terhadap umat beragama tahun 2012 dapat dilihat dari (a) perayaan keagamaan telah dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan penuh toleransi; 1) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Senin, 06 Februari 2012/13 Rabi'ul Awal 1433 H; 2) Peringatan Isra Mi'raj Senin, 25 Juni 2012, 3) Nuzulul Quran, Selasa, 1 Agustus 2012, 4) Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1433 Hijriyah, 5) Salat Idul Adha, Jum'at, 26 Oktober 2012/10 Dzulhijjah 1433 H, 6) Tahun Baru Islam, Kamis, 15 November 2012/1 Muharram 1434 Hijriyah; (b) Bertambahnya Desa Binaan, pada tahun 2009, 7

desa binaan, pada tahun 2010 sejumlah 15 desa binaan dan pada tahun 2011 menjadi 20 desa binaan. Pesebaran desa binaan di antaranya: Banten, Babel, Jawa Timur, DIY, Kalbar, Sulbar, Maluku, Sumut, Lampung, Jabat, Jateng, Kalsel, Sulsel, Bali, NTB, Sumsel, Sulteng, Malut, Kalteng dan NTT. Desa binaan adalah upaya Ditjen Bimas Islam dalam rangka memperkuat nilai-nilai keagamaan, meningkatkan perekonomian, meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam (c) berkurangnya kekerasan yang mengatasnamakan agama hingga terpelihara suasana yang aman dan damai di kalangan umat beragama; (d) Jumlah kegiatan penyadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal dengan dilaksanakannya upaya penyuluhan dan pengawasan pencantuman tanda halal, pemasyarakatan gerakan masyarakat sadar halal, International conference control of halal food, bimbingan teknis dan pengawasan produk halal.(e) meningkatnya jumlah keluarga sakinah yang digambarkan dengan data sebagai berikut:

No	Kategori	2008	2011
1	Pra Sakinah	291.639	9.625.072
2	Sakinah I	376.681	12.430.474
3	Sakinah II	359.376	11.859.399
4	Sakinah III	220.767	7.285.309

## 2) Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama

Pelayanan keagamaan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi terpenuhinya hak beragama masyarakat. Capaian Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama tahun 2012 sebesar 97,11%, dimana target sebesar hingga 45% terealisasi sebesar 43,7%. Meskipun tidak tercapai sesuai target namun capaian target tahun ini sudah dikatakan baik, jika dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 98,02% ada sedikit penurunan 0,91%%. Capaian target indikator kinerja ini mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan umat beragama terhadap layanan sudah cukup baik. Potensi yang sudah mendukung capaian target indikator kinerja ini adalah: capain indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat Islam sebesar 94%, Kristen

100%, Hindu 92,22%, dan Buddha 100%. Hasil yang dapat ditunjukkan dari capaian target indikator ini, antara lain: (a) kemudahan umat Islam dalam melaksanakan ibadah karena bertambahnya tempat ibadah yang dapat dipergunakan masyarakat, dimana tahun 2012 telah dibangun/renovasi sebanyak 157 masjid, 50 gereja, dan 49 wihara; (b) terbitnya peraturan bidang pelayanan keagamaan sebagai landasan dalam menjalankan pelayanan keagamaan Islam, diantaranya PMA tentang Atase Agama/PPN di luar negeri hal ini untuk memenuhi tuntutan layanan umat Islam Indonesia yang berada di luar negeri, pedoman standarisasi bidang pelayanan yaitu: standarisasi KUA dan standarisasi mutu pelayanan KUA dengan kejadian peristiwa nikah pada tahun 2011 sebanyak 2.207.364 meningkat sebanyak 2% dari jumlah pada tahun 2010 sebanyak 2.162.155 peristiwa nikah; (c) terbitnya 74 Setifikat Halal Bagi Pengusaha Kecil di DKI Jakarta dan Lampung, hasil bantuan pemerintah dengan demikian semakin banyak produk halal yang bersertifikasi yang dapat dikonsumsi masyarakat; (d) Tersusunnya RUU Jaminan Produk Halal dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kehalalan pada produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat; (e) dicanangkannya Gerakan Masyarakat Sadar Halal Percontohan bagi masyarakat; (f) berkembangnya laboratorium halal sebagai pusat informasi data yang valid produk halal dengan meningkatkan kemampuan tenaga laboran/analisis melalui validasi metode uji analisis DNA dan Etanol; dan (g) sebanyak 2374 mahasiswa miskin Indonesia penerima bantuan berhasil menyelesaikan studi dengan lancar dan berdaya saing (h) Peningkatan pelayanan sistem informasi terpadu Bimbingan Masyarakat Islam menjadi 157 titik pada tahun 2011 dari 90 titik pada tahun 2010. sistem informasi terpadu Bimbingan Masyarakat Islam ini meliputi, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sistem Informasi Aplikasi Zakat (SIMZAT), Sistem Informasi Aplikasi Wakaf, Sistem Aplikasi Penyuluhan, Sistem Aplikasi Produk halal.

Meskipun capaian indikator kinerja ini tidak tercapai secara maksimal, namun dapat dikatakan pencapaian tersebut sudah cukup baik. Adapun permasalahan yang memicu indikator ini tidak dapat mencapai target diantaranya adalah standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan belum diterapkan secara maksimal.

### 3) Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama

Capaian Indeks kualitas pemberdayaan terhadap masyarakat umat beragama tahun 2012 sebesar 90,65%, dari target yang telah ditetapkan sebesar 31% terealisasi 28,10% sehingga target tidak tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.

Jika dibandingkan capaian target tahun 2011 sebesar 96,10% capaian tahun ini mengalami penurunan sebesar 5,46%. Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh serapan anggaran. Adapun yang mendukung capaian target indikator kinerja ini adalah capaian target indeks kualitas pemberdayaan umat Islam sebesar 92,50, umat Kristen 88%, umat Katolik 83,33%, umat Hindu 90%, dan umat Buddha 98,33%.

Potensi yang sudah mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain: (a) kualitas Imam dan Khatib sehingga mampu memberikan dampak positif kepada umat dalam keadaan aman dan damai serta dapat menciptakan toleransi antar umat beragama; (b) terciptanya masjid sebagai pusat pembinaan umat dengan diterbitkannya PMA Standarisasi Masjid.

### 4) Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama

Capaian target indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama tahun 2012 sebesar 93,53% dari target yang telah ditetapkan sebesar 34% terealisasi 31,8% sehingga target tidak tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Dibandingkan tahun 2011 sebesar 99%, capaian target indikator kinerja indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama tahun ini mengalami penurunan sebesar 5,47%, adapun kendalanya adalah belum adanya fokus perencanaan dan realisasi program pada aspek pengembangan yang terintegrasi antara satu unit dengan unit lainnya. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat ditandai dengan antara lain (a) Tersusunnya hasil rumusan “Dialog Bersama Tokoh Agama tentang Pembinaan Syariah” melalui “Musyawarah Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS” yang akan dibawa ke *Mesyuarat* SOM MABIMS di Singapura pada bulan September 2014. Rumusan yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut:

Musyawah/*Mesyuarat* bersetuju:



- Penyelenggaraan Musyawarah/Mesyuarat Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS Tahun 2014 akan diselenggarakan di Singapura;
- Untuk melakukan kajian ulang atas kriteria MABIMS dalam penetapan awal bulan dengan mempertimbangkan tidak hanya berdasarkan aspek *scientific* tetapi juga mempertimbangkan aspek syar'i, sosiologi dan psikologis;
- Membentuk tim kecil untuk melakukan kajian ulang atas kriteria MABIMS tentang penetapan awal bulan Hijriyah dengan melibatkan instansi-instansi yang berwenang/berkuasa di negara masing-masing beserta para ulama;
- Untuk menyelenggarakan suatu seminar yang dihadiri oleh ahli astronomi dan ilmu falak;
- Untuk memperkuat laman web/website hisab rukyat yang akan dikelola oleh Singapura;
- Untuk melakukan training dan observasi secara bersama-sama dengan negara anggota MABIMS di Brunei Darussalam.

Menurunnya aksi kekerasan dengan alasan agama, hal ini didukung ditingkatkannya Pertemuan Ormas Islam; (c) Tersedia dan tersalurkannya kitab suci bagi masyarakat umat beragama yaitu Al-Quran sebanyak 325.000 eks, Tafsir Tematik 12.500 Set Tafsir Ilmi 15.000 set Tafsir Qur'an 12.500 set, surat Yasin 50.000 eksemplar, Al-quran dan terjemahan 400.000 eksemplar; ar jus amma dan terjemahan 91.000 eksemplar, kitab suci agama Hindu 5.500 eks, dan 2500 eks kitab suci agama Buddha; (d) terpilihnya 33 pasang keluarga sakinah dari berbagai agama diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan keluarga sakinah khususnya ditengah keluarganya masing-masing dan masyarakat pada umumnya.

## 2. Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional

### Sasaran Strategis 2

#### Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk	15 lembaga	15 lembaga	100%

2.	Pemulihan Pasca konflik	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2</b>				<b>100%</b>

- a. Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:  
Capaian target kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional tahun 2012 sangat memuaskan yaitu 100%. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini keduanya mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan telah berdirinya 33 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan 383 FKUB Kab/Kota serta telah tersedianya 15 lembaga sekretariat bersama FKUB. Keberadaan ini sebagai modal penting dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- b. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

#### **1) Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama**

Dalam rangka mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional dan dalam upaya meningkatkan kerukunan umat beragama telah dilakukan antara lain melalui penerbitan, sosialisasi, dan implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Sejak penerbitan Peraturan Bersama tersebut, telah berdiri 33 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan 383 FKUB Kabupaten/Kota. Sejak pendirian FKUB tersebut, Kementerian Agama telah menetapkan dalam Renstra target indikator operasional FKUB Tahun 2012 adalah 333 lembaga telah beroperasi sebagaimana mestinya, dan pada kenyataannya target tersebut telah terealisasi semua yaitu 333 lembaga. Sehingga tingkat capaian targetnya sebesar 100%. Dalam rangka mendukung operasional FKUB yang ada disetiap provinsi, Kementerian Agama pada tahun

2012 telah menetapkan target 15 Sekretariat Bersama FKUB, dan sudah terealisasi semua, sehingga capaian target Sekber FKUB Kab/Kota sebesar 100%

#### **a) Pemulihan Pasca Konflik**

Capaian pemulihan pasca konflik sebesar 100%, dari target 1 kegiatan pemulihan pasca konflik telah dapat terselesaikan sesuai target. Kasus sampang yang belakangan ini terjadi kembali bukanlah yang biasa namun sudah sering terjadi yang diawali dari tahun 2004. Pada tahun 2012 Kementerian Agama telah melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan penyelesaian permanen terhadap permasalahan di Sampang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Jatim, Bupati Sampang, MUI, PBNU, IJABI, dan ABI. Upaya tersebut telah menghasilkan Rumusan:, diantaranya: (a) dakwah harus disampaikan dengan baik dan tidak sampai menimbulkan keresahan, dan selalu memperhatikan kondisi masyarakat ; (b) PBNU siap menciptakan dan mewujudkan situasi yang kondusif di Jawa Timur; (c) Pemprov Jatim akan memfasilitasi pengungsi mencari tempat tinggal sementara; (d) Pemerintah Daerah akan berupaya memberikan jaminan ketertarikan dan ketertiban bagi masyarakat di Sampang.

Upaya-upaya lain yang sudah dilakukan Kementerian Agama antara lain:

- (1) Pada tanggal 4 September 2012 melakukan negosiasi dengan yang berkonflik di Sampang (Tajul dan Ahlul Bait Indonesia) agar pengungsi Syiah bersedia dipindahkan ke tempat yang lebih representatif dan aman namun mereka menolak;
- (2) Yang berkonflik bersedia mengadakan perjanjian perdamaian tanpa syarat, setelah diadakan pertemuan antara Kakanwil Kemenag Prov. Jatim dan Asisten III Pemprov Jatim di LP Sidoarjo;
- (3) Menencanakan langkah-langkah dalam penanganan kasus kerusuhan di daerah Sampang, diantaranya: (1) Mengirim penyuluh agama Islam ke daerah konflik; (2) menyiapkan program kerja jangka panjang sebelum Baiat Perdamaian berupa menenangkan masyarakat (*colling down*) agar tidak melakukan aktivitas yang memancing timbulnya konflik; (3) melakukan penyuluhan dengan materi-materi mengenai kerukunan umat beragama, dimana sasarannya adalah daerah konflik dan pengungsi.

Adapun yang menghambat pemulihan pasca konflik, diantaranya: (1) 70% dari masyarakat yang berkonflik adalah buta huruf; (2) pandangan bahwa orang tua, guru, pemerintah hanyalah simbol saja sedang (Ustadz atau Kyai) merupakan panutan/sumber hukum satu-satunya; (3) tingkat perekonomian masyarakat di daerah konflik sangat rendah; (4) akar permasalahan yang terakumulasi dari masalah keluarga, asmara, perbedaan fatwa keagamaan, dan masalah politik - kultural.

**3. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa**

**Sasaran Strategis 3**

**Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. APK Lembaga Pendidikan Islam			
- MI	13,55%	10,65%	78,60%
- MTs.	20,22%	18,64%	92,18%
- MA	7,35%	14,08%	191,56%
- PTAI	2,89%	3,28%	113,49%
2. APM Lembaga Pendidikan Islam			
- PTAI	2,35%	3,28%	139,57%
3. Rerata Nasional Nilai UN	8.00	7,95	99,37%
<b>Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3</b>			<b>119,13%</b>

a. Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja atas sasaran strategis 3 (tiga) yaitu Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa tahun 2012 tercapai melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 119,30%. Dari indikator-indikator kinerja yang dipergunakan sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran ini sebanyak 6 indikator kinerja, 3 (tiga) diantaranya tercapai melebihi target dan 3 (tiga) indikator lainnya tercapai dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi masyarakat terhadap pendidikan tingkat dasar sangat kurang dibandingkan dengan pendidikan menengah atas dan pendidikan tingkat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi jumlah masyarakat Indonesia yang secara kasar merasakan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikarenakan adanya perubahan paradigma masyarakat untuk

memberikan pendidikan umum dan keagamaannya melalui sekolah-sekolah terpadu yang tidak dikelola oleh Kementerian Agama

- b. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### 1) APK Lembaga Pendidikan Islam

Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam tahun 2012 pada jenjang pendidikan MA dan PTAI melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 14,08% dan 3,28% dari target yang sebesar 7,35% dan 2,89%, sehingga tingkat capaian target indikator ini sebesar 191,56% untuk MA dan 113,49 untuk PTAI. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi jumlah masyarakat Indonesia yang secara kasar merasakan jenjang pendidikan tinggi pada Lembaga Pendidikan Islam mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hanya saja, APK pada Lembaga Pendidikan Islam tahun 2012 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti MI, MTs, Pesantren Salafiyah Ula, Wustha, Kelompok Belajar Paket A, B dan C kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10,65%; 18,64%; 0,26%; 1,07%; 0,04%; 0,16%; dan 0,44% dari target yang sebesar 13,55%; 20,22%; 0,63%; 2,42%; 0,09%; 0,29%; dan 0,59% sehingga capaian target indikator ini masing-masing sebesar 78,60%; 92,18%; 41,27%; 44; 21%; 44,44%; 55,17%; dan 74, 58%. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi masyarakat Indonesia yang merasakan jenjang pendidikan dasar dan menengah belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya perubahan paradigma masyarakat untuk memilih pendidikan umum dan keagamaannya melalui sekolah-sekolah terpadu yang tidak dikelola oleh Kementerian Agama, disamping semakin berkurangnya jumlah masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya melalui Kelompok Belajar Paket A, B maupun C.

Capaian target APK Nasional dan Persentase Provinsi Ber-APK 70% pada pendidikan menengah mengalami peningkatan menjadi 101,23% dan 101,75 karena telah terealisasi 8,23% dan 58% dari target yang telah ditetapkan sebesar 8,13% dan 57%, hingga target capaiannya masing-masing. Demikian halnya dengan realisasi Persentase Provinsi Ber-APK 60% pendidikan menengah juga mengalami peningkatan menjadi 57% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian targetnya 103,64%. Hanya saja

Persentase Kota Ber-APK 95 % mengalami penurunan menjadi 73,78% dari target yang telah ditetapkan sebesar 74% dengan capaian target 99,70%. Hal ini menandakan bahwa ada kenaikan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada pendidikan umum dan keagamaan yang dikelola oleh Kementerian Agama terkecuali pada Persentase Kota ber-APK 95% yang dikarenakan secara umum banyak sekolah-sekolah terpadu yang didirikan pada kota-kota besar sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.

## 2) APM Lembaga Pendidikan Islam

Angka Partisipasi Murni (APM) pada Lembaga Pendidikan Islam tahun 2012 pada jenjang pendidikan tinggi PTAI mengalami peningkatan yaitu 3,28% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,35% sehingga capaian target indikator ini sebesar 139,57%. Ini menandakan bahwa selain animo masyarakat Indonesia yang semakin besar untuk merasakan jenjang pendidikan tinggi terutama pada PTAI juga dikarenakan semakin bersaing dan berkualitasnya pengelolaan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama.

## 3) Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional (UN) untuk madrasah

Terkait dengan perkembangan kualitas peserta didik yang diukur dari capaian target dari realisasi Rerata Nasional Nilai UN adalah sebesar 7,95 dan ini masih dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 8,00 dengan capain targetnya sebesar 99,37%. Meskipun demikian antara realisasi dengan target hanya terjadi *gap* yang sangat kecil. Akan tetapi, secara umum Rerata Nasional Nilai UN untuk MTs, MA program IPS maupun MA program Keagamaan besarnya merata antar jenjang pendidikan yaitu sebesar 7,68; 7,61; 7,60 dengan capaian targetnya masing-masing 96%, 95,12%, dan 95%. Namun meskipun capaiannya tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah, UN MTs Tahun 2012 melebihi capaian kelulusan UN SMP/MTs/Sederajat. Berdasarkan hasil penilaian dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Penyelenggara Ujian Nasional menyatakan bahwa **“Hasil kelulusan Ujian Nasional (UN) siswa MTs Tahun 2012 mencapai (99,69%); lebih tinggi dibanding persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Sederajat secara nasional (99,57%)”**. Kelulusan UN MTs tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yaitu 99,67%.

Capaian yang sama juga diraih oleh siswa MTs dilihat dari Nilai Murni, Persentase kelulusan UN siswa MTs dengan Nilai Murni 5,5 keatas mencapai 92,29%; diatas kelulusan siswa SMP (91,37%); dan kelulusan secara nasional siswa SMP/MTs/Sederajat yaitu (91,37). Namun diakui dibalik keberhasilan yang membanggakan tersebut masih ada empat MTs Swasta yang persentase kelulusannya pada UN Tahun 2012 dibawah 25%, yakni satu MTs di Maluku Utara, dan dua MTs di Sulawesi Tengah.

Dalam hal pengembangan kualitas akademik peserta didik, diwujudkan dengan meningkatnya realisasi Persentase Peserta Didik MTs/ PPS Wustha SBI Meraih Skor TOEIC/Institutional TOEIC 350 atau Ekuivalensinya dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 41% dari 40% dengan tingkat capaiannya 102,5%. Akan tetapi dalam hal Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional justru realisasi yang ada hanya sebesar 10% dari target yang telah ditetapkan sebesar 11%, dengan capaian targetnya 90,90% sehingga hal ini bisa menjadi perhatian untuk dapat meningkatkan prestasi akademik dalam kompetisi-kompetisi selanjutnya.

**4. Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat**

**Sasaran Strategis 4**  
**Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Indeks kualitas pembinaan dan pelayanan haji dan umrah	50%	50%	100%
2. Indeks kualitas pengembangan informasi haji	50%	50%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4</b>			<b>100%</b>

- a. Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:  
 Capaian target kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat tahun 2012 sangat memuaskan yaitu tercapai 100%. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini keduanya

mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Keberhasilan capaian target sasaran strategis ini dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas pembinaan, kualitas pelayanan, kualitas pengembangan dan kualitas pembinaan umrah yang masing-masing mencapai 100%.

- b. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### **1) Indeks kualitas pembinaan dan pelayanan haji dan umrah**

#### a) Pembinaan Haji

Keberhasilan capaian indeks kualitas pembinaan haji tahun 2012 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari hasil capaian target indikator kinerja yang telah dicapai sebesar 100%, dari target awal 50% dan terealisasi 50%. Capaian 100% juga dicapai pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebagai salah satu program prioritas yang sering diposisikan sebagai salah satu indikator kunci Kementerian Agama telah berjalan cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari:

- (1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pembinaan haji, antara lain: penyusunan beberapa dokumen standar, yaitu dokumen standar bimbingan Jemaah, pembinaan petugas, pembinaan haji, dan pembinaan umrah, selain itu tersedianya modul/materi pembinaan berupa buku manasik bagi jemaah haji dan penyediaan audio visual berupa VCD bimbingan manasik haji.
- (2) Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan manasik haji, dapat dilihat dari pelaksanaan dilapangan antara lain menyelenggarakan kegiatan bimbingan mansik haji bagi jemaah haji yang dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui KUA dan ditingkat kabupaten/Kota melalui kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan jumlah bimbingan sebanyak 7 kali pertemuan di KUA dan 3 kali pertemuan di Kankemenag. Dengan demikian pemenuhan bimbingan manasik Haji bagi jemaah haji reguler tahun 2012 sebanyak 194.000 jemaah haji sudah terpenuhi. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas bimbingan dan performa pembimbing manasik haji, Direktorat Jenderal PHU melakukan sertifikasi bagi



pembimbing manasik haji. Adapun jumlah pembimbing yang telah tersertifikasi tahun 2012 sebanyak 100 orang.

- (3) Tersedianya Petugas Haji yang Profesional, pada tahun 1433 H/2012 Direktorat Jenderal PHU menyiapkan sebanyak 3.956 petugas, dengan rincian, petugas kloter sebanyak 530 orang, petugas Nonkloter sebanyak 962 orang, dan tenaga musiman di Arab Saudi sebanyak 679 orang. Penyiapan petugas haji dilakukan melalui pola rekrutmen secara ketat baik di daerah maupun pusat termasuk di Arab Saudi. Proses rekrutmen petugas melibatkan lembaga psikologi dan dalam pelaksanaan diawasi langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, setelah melalui tahap penyeleksian, bagi petugas yang lulus seleksi selanjutnya mengikuti pelatihan dan pembekalan Petugas Haji sehingga tersedianya Petugas haji yang profesional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan keberangkatan sebanyak 211.000 orang jamaah, satu orangpun tidak ada yang tertinggal di Arab Saudi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan kepada KBIH, PIHK, PPIU yang semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari upaya Kementerian Agama yang sudah dilakukan antara lain: (1) pelaksanaan program akreditasi bagi 1160 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan pemeringkatan travel bagi 251 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), (2) Dalam rangka melindungi jemaah haji khusus, Kementerian Agama telah melakukan langkah-langkah penyempurnaan diberbagai sisi, mulai dari peningkatan tatakelola dan pengawasan PIHK hingga sanksi penutupan usaha bagi travel yang melanggar aturan dan pada tahun 2012 Kementerian Agama telah mencabut izin 16 PIHK karena melakukan pelanggaran.

b) Pelayanan Haji dan Umrah

Keberhasilan capaian indeks kualitas pelayanan haji tahun 2012 dari target awal 50%, tercapai seluruhnya (100%). Hal ini sama dengan hasil capaian tahun 2011. Kualitas pelayanan haji berjalan cukup stabil, kondisi ini didukung oleh:

- (1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi layanan, melalui upaya optimalisasi pelayanan pendaftaran yang berkesinambungan. Rencana pemberangkatan bagi jemaah Indonesia tahun 2012 dari target 211.000 jamaah, telah diberangkatkan seluruhnya.

(2) Kualitas pelayanan pendaftaran tahun 2012 semakin meningkat, upaya yang sudah dilakukan antara lain pendaftaran jemaah haji melalui Siskohat di Kankemenag secara online serta peningkatan pelayanan akomodasi dan katering haji, hal ini dapat dilihat dari:

- Jarak pemondokan di Mekkah seluruhnya berada pada radius 2.500 m dari masjidil haram sehingga jemaah haji tidak memperoleh uang pengembalian selisih sewa pemondokan di Makkah, sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Perbandingan Jarak Pemondokan di Mekkah

No	Thn	Jml Jemaah	Jarak					
			0 - 2.000m		0 - 2.000m		4001-7000 m	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2010	200.855	127.338	63	74.744	37	0	0
2	2011	202.553	187.424	93	15.123	7	0	0
3	2012	194.000	139.680	72	54.320	28	0	0

- Pemondokan di Madinah, untuk tahun 1433H/2012M seluruhnya berada di wilayah Markaziah dengan jarak maksimal 600 m dari masjid Nabawi. Pengaturan penempatan jemaah haji sepenuhnya dilakukan oleh majmuah sesuai siklus kedatangan Jemaah. Kapasitas total pemondokan di Madinah sebanyak 194.000 orang, sebagai rinciannya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 7

Perbandingan Pemondokan di Madinah

NO	TAHUN	KUOTA	WILAYAH			
			Markaziyah		Non Markaziyah	
			Jml	%	Jml	%
1.	2010	197.500	187.625	95	9.875	5
2.	2011	201.000	201.000	100	0	0
3.	2012	194.000	194.000	100	0	0

- Pelayanan Katering selama berada di Arab Saudi  
jemaah haji mendapat pelayanan katering di masing-masing wilayah perhajian, adapun penjelasan distribusi katering selama di Arab Saudi sebagai berikut:
  - ✓ Pelayanan katering di Masyair (Armina)  
Pelayanan katering di Arafah diberikan mulai tanggal 8 Dzulhijjah malam sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah sebelum keberangkatan ke Muzdalifah sebanyak empat kali. Pada saat wukuf (makan siang) dan menjelang keberangkatan ke Muzdalifah, katering diberikan dengan menggunakan box, selain itu disajikan dalam bentuk prasmanan sesuai dengan jadwal dan menu yang telah ditetapkan. Pelayanan katering dilengkapi dengan *coffee shop*.  
Pelayanan katering berupa satu box makanan ringan yang didistribusikan kepada setiap jemaah di Arafah menjelang keberangkatan ke Muzdalifah. Pelayanan katering di Mina diberikan dalam bentuk prasmanan/kemasan boks dan dilengkapi dengan pelayanan *coffee shop* mulai makan pagi tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan makan Siang tanggal 13 Zulhijjah.
  - ✓ Pelayanan Katering di Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah  
Katering dikemas menggunakan box, pendistribusian katering dilaksanakan diatas bis, ketika jamaah haji akan berangkat menuju Madinah (gelombang I) dan menuju Makkah (gelombang II) yaitu pada fase I (kedatangan jemaah haji) diberikan satu box sesuai dengan menu yang ditentukan. Sedangkan pada fase II (pemulangan) diberikan satu box sebelum jemaah haji berangkat ke tanah air yaitu saat berada di area peristirahatan Bandara KAAIA Jeddah
  - ✓ Pelayanan Katering Madinah  
Pelayanan katering di Madinah diberikan sebanyak 18 kali dengan menggunakan kemasan box yang diberi label masa penggunaan dan kadaluarsa dengan menu yang telah ditentukan. Pendistribusiannya dilakukan setiap hari di pemondokan sebanyak dua kali

(makan siang dan malam) sesuai dengan menu dan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk diberikan paket coffee shop (teh, kopi, susu, gula, dan air panas).

✓ Pelayanan Transportasi

Kualitas pelayanan transportasi semakin meningkat, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya layanan transportasi darat bagi jemaah haji yang meliputi transportasi antarkota perhajian yaitu Jeddah, Makkah, dan Madinah, yang dilakukan oleh naqobah. Bagi jemaah haji yang menempati pemondokan lebih dari 2.000 meter dari Masjidil Haram dan pemondokan di Wilayah Mahbas Jin disediakan transportasi yang seluruh biayanya dibebankan dalam komponen *indirect cost* BPIH.

Pelaksanaan transportasi tersebut dilakukan oleh perusahaan SAPTCO meliputi wilayah Mahbas Jin, Maabdah, Rea Dzakhir, Nakasah, dan Syari' Mansyour yang dikendalikan langsung oleh Sektor Khusus, sedangkan penyiapannya dilakukan oleh Tim Penyiapan Angkutan Jemaah Haji Indonesia di Makkah tahun 1433 H/2012 M. Tim tersebut melibatkan tenaga ahli transportasi darat dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk transportasi antar kota perhajian (Jeddah-Makkah-Madinah) dan Armina dilaksanakan oleh Naqabah (organda Arab Saudi). Transportasi di Armina menggunakan sistem shuttle (Taraddudi).

Namun peningkatan kualitas pelayanan haji tersebut bila dibandingkan dengan hasil pemantauan oleh pihak eksternal menunjukkan adanya sedikit penurunan dari tahun 2011 sebesar 1,31%. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan jemaah haji tahun 2012 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi 7 aspek penilaian dalam survey tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8  
Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS)  
Terhadap kepuasan Jemaah Haji Tahun 2012

No	Jenis Pelayanan	2011	2012	Perubahan (%)
1.	Pelayanan Petugas Kloter	88,37	88,36	-0,01
2	Pelayanan Petugas Non Kloter	85,07	82,31	-2,76
3.	Pelayanan Ibadah	85,82	86,04	0,22
4.	Pelayanan Akomodasi/Pemondokan	82,56	81,38	-1,18
5.	Pelayanan Catering	80,46	78,24	-2,22
6.	Pelayanan Transportasi	77,41	74,00	-3,41
7.	Pelayanan Umum Lainnya	82,98	83,18	0,20
<b>Rerata Kupasan Jemaah</b>		<b>83,24</b>	<b>81,93</b>	<b>-1,31</b>

c) Pengembangan Informasi Haji

Indeks kualitas pengembangan Informasi Haji tercapai 100% dari target 50% terealisasi 50%. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan:

- (1) Pengembangan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan BPS BPIH untuk melakukan input data pendaftar haji, selanjutnya dilakukan pengembangan jaringannya hingga tahun 2012 menjadi pada 26 BPS BPIH, 12 Embarkasi dan tiga Embarkasi Antara, 33 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 420 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Teknis Urusan Haji Arab Saudi. Mengingat belum terintegrasinya sistem informasi pendaftaran, identifikasi jemaah, dokumen dan keuangan mengakibatkan proses rekonsiliasi dilakukan secara manual sehingga perlu adanya pengembangan *upgrade* Siskohat yang diarahkan untuk membangun infrastruktur berbasis *biometric system* di seluruh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem Imigrasi, restrukturisasi pengelolaan Siskohat, rekrutmen dan pengembangan SDM, penerapan aplikasi *switching* untuk pengendalian setoran awal BPIH, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam aplikasi Siskohat, dan migrasi data Siskohat.
- (2) Tersedianya pusat informasi haji berupa **Call Center Haji** yang dapat diakses melalui nomor 500425 dan Buku Pintar Haji yang dapat diunduh melalui [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id)

## 2) Indeks kualitas pembinaan umrah

Peningkatan kualitas pembinaan umrah dilakukan melalui, 1). pelaksanaan Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan PPIU, sampai tahun 2012 PPIU yang telah terakreditasi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah berjumlah 399 penyelenggara. 2). Mengendalikan dan memantau pelaksanaan PPIU dengan cara bekerjasama dengan pihak kepolisian dan imigrasi terkait PPIU ilegal. 3). Melakukan Orientasi standar pelayanan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) guna meningkatkan pemahaman standar pelayanan PPIU, 4). Melaksanakan workshop pola pembinaan PPIU tingkat nasional 5). Pembuatan Nota kesepahaman (MoU) tentang PPIU dengan instansi terkait.

### 5. Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional

#### Sasaran Strategis 5

**Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. % SDM berkinerja sangat baik	40%	38,8%	97%
2. Persentase ketersediaan SPM & SPO	80%	70%	87,5%
3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP	WTP(DPP)	95%
4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan	33 provinsi	33 provinsi	100%
5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan	15%	12%	120%
6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.	90%	42,47%	47,19
<b>Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 5</b>			<b>91,11%</b>

**a. Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Capaian target kinerja sasaran strategis 5 (lima) yaitu terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional tahun 2012 tercapai 91,11%. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini ada dua yang mencapai target bahkan satu diantaranya yaitu indikator tingkat pelanggaran dan penyimpangan melampaui target yang sudah ditetapkan tercapai 120%, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya kinerja bidang pelayanan. Capaian terendah pada indeks tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan yang capaian targetnya hanya 47,19%, hal ini dikarenakan terlambatnya laporan tindak lanjut temuan dari satuan organisasi/kerja terkait temuan.

**b. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

**1) Persentase SDM berkinerja sangat baik**

Capaian indikator SDM berkinerja sangat baik tahun 2012 sebesar 97%, dari target 40 % terealisasi 38,8%. Capaian ini dibandingkan tahun 2011 sebesar 85,43 telah mengalami peningkatan sebesar 11,57%. Potensi yang mendukung keberhasilan ini antara lain: (1) Sebanyak 230.678 orang PNS Kementerian Agama telah menunjukkan kinerjanya yaitu potensial dan inovatif, berkualitas dan profesional sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki; (2) berkurangnya pegawai yang indisipiner sebanyak 120 orang pegawai yang indisipiner, jika dibandingkan dengan tahun 2011 berjumlah 147 orang, tingkat penurunannya sudah cukup baik; (3) terciptanya mekanisme seleksi penerimaan CPNS yang jujur, adil, efektif, efisien, transparan, dan profesional berdasarkan manajemen mutu pelayanan kepegawaian ISO 9001-2008, bahkan sistem rekrutmen CPNS Kementerian Agama mendapatkan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001-2008 dengan standar internasional dari PT. SGS (Societe Generale De Surveillance) Indonesia dan telah diserahkan langsung oleh Direktur PT. SGS Indonesia kepada Menteri Agama pada tanggal 18 Desember 2012 di Auditorium Kementerian Agama Jln. KH. Thamrin Jakarta Pusat, yang disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil KPK,

dan Ombudsment, (4) perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan, pengangkatan dalam jabatan dan mutasi pegawai berdasarkan hasil *fit and propertest* serta *need assasment* yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan keadilan, kejujuran, loyalitas, integritas, profesionalisme dan prestasi adalah salah satu faktor yang mendorong tercapainya peningkatan SDM berkinerja sangat baik.

## **2) Pesentse ketersediaan SPM & SOP**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai kontrol kualitas, di lingkungan Kementerian Agama hingga tahun 2012 sudah tersedia 28.540 SOP dari 4.501 satuan kerja dan 5.382 satuan organisasi. Hal ini adalah bukti dari pencapaian target indikator persentase ketersediaan SPM dan SOP sebesar 87,5 % dari target 80 % dan terealisasi 70% . Sedangkan untuk menstandarkan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama, telah tersedia 111 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari berbagai jenis layanan yang tersebar pada masing-masing satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama.

## **3) Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

Target Capaian opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2012 sudah tercapai, bahkan tahun 2011 sudah tercapai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP), dibandingkan tahun 2010 hanya mendapat opini WDP. Adapun penjelasan LK Kemenag sehingga belum mencapai 100% WTP, adalah: (1) Penggunaan Langsung PNBPN Satker Non BLU di Luar Mekanisme APBN; (2) Kesalahan Penganggaran Belanja; dan (3) Hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap. Penjelasan ini diakui oleh Kementerian Agama karena masih lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran dan kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tekad untuk memperoleh WTP ini juga dilakukan sangat serius, dimana dalam persiapan



sejak tahun 2007 hingga sekarang Kementerian Agama sudah merekrut lebih dari 1.700 akuntan sebagai PNS dan merekrut 1000 tenaga IT yang ditugaskan diberbagai satker seluruh Indonesia. Namun untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan LK Kemenag, jumlah tenaga tersebut belum seimbang dibandingkan dengan jumlah satker yang berjumlah 4.467 satker.

#### 4) Jumlah unit organisasi yang disempurnakan

Target jumlah unit organisasi yang disempurnakan pada tahun 2012 sudah tercapai yaitu 100%, sehingga tingkat capaian targetnya 100%. Yang mengindikasikan target indikator kinerja jumlah unit organisasi yang disempurnakan tercapai sesuai target adalah:

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, dimana penataan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja pada 33 Kanwil Kementerian Agama dengan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Pusat dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 9  
Penambahan/Pengurangan Tingkat Kanwil

AGAMA	BIDANG			SEKSI			PEMBIMAS			JML	
	BARU	LAMA	+/(-)	BARU	LAMA	+/(-)	BARU	LAMA	+/(-)	+	(-)
Islam	146	134	12	718	652	66	5	6	(1)	78	(1)
Kristen	13	13	0	59	59	0	23	23	0	0	0
Katolik	3	3	0	12	12	0	31	31	0	0	0
Hindu	3	3	0	12	12	0	29	24	5	5	0
Buddha	0	0	0	0	0	0	31	27	4	4	0
Hindu-Budha	0	0	0	0	0	0	0	5	(5)	0	(5)
<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>153</b>	<b>12</b>	<b>801</b>	<b>735</b>	<b>66</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>(6)</b>
<b>Penambahan Subbag</b>											
	<b>Baru</b>	<b>Lama</b>		<b>+/(-)</b>							
	<b>165</b>	<b>152</b>		<b>13</b>							

Tabel 10  
Penambahan/Pengurangan Tingkat Kab/Kota

AGAMA	SEKSI			PENYELENGGARA			JUMLAH	
	BARU	LAMA	+/(-)	BARU	LAMA	+/(-)	LAMA	+/(-)
Islam	1.767	1.703	67	443	444	(2)	67	(2)
Kristen	136	129	5	95	73	22	27	0
Katolik	75	74	0	85	83	3	3	0
Hindu	22	22	0	36	35	1	1	0
Buddha	3	3	0	35	30	4	4	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.003</b>	<b>1.931</b>	<b>72</b>	<b>694</b>	<b>665</b>	<b>29</b>	<b>102</b>	<b>(2)</b>

Dengan terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang telah disempurnakan tersebut diharapkan semua unsur di lingkungan instansi vertikal dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan instansi vertikal Kemenag maupun hubungan antar instansi pemerintah pusat maupun daerah.

## 5) Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan

Tingkat pelanggaran dan penyimpangan pada tahun 2012 yang diharapkan hanya 15% ternyata menurun hingga 12%, sehingga tingkat capaian target indikator ini mencapai 120%. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan di lingkungan Kementerian Agama yang semakin menurun dapat diukur dari:

- a. Meningkatnya ketaatan aparaturnya Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan, yang dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya tingkat pelanggaran dan penyimpangan pegawai dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 Kementerian Agama telah memproses terhadap 120 orang pegawai yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 147 sedangkan tahun 2010 sebanyak 244 pelanggaran.

Tingkat penurunan pelanggaran tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11  
Data Indisipliner Pegawai

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2010	244 pegawai
2	2011	147 pegawai
3	2012	120 pegawai

- b. Terbitnya Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Agama.
- c. Menurunnya jumlah kerugian negara yang ditargetkan hanya 5%, ternyata realisasinya menurun hingga 1,02% sehingga capaian targetnya sebesar 179%. Dibandingkan tahun 2011 jumlah kerugian negara sebanyak 8.377 kasus, dengan kerugian negara sebesar Rp177.364.209.349,30 dan tahun

2012 dengan kerugian negara sebanyak 4894 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp36.102.838.365,34 ada penurunan 20,36%, dengan demikian capaian target indikator ini sudah cukup baik. Namun apabila ditinjau dari upaya tindak lanjut atas temuan tersebut Rekapitulasi hasil temuan BPK, BPKP, dan ITJEN dalam 2 tahun terakhir dapat kami ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 12  
Data Temuan Kerugian Negara  
Tahun 2011 dan 2012

No	Unit Pengawasan	Jumlah Temuan				
		2011		2012		
		K	Rp	K	Rp	
1.	BPK-RI	Rp	248	22.323.023.912,99	139	14.312.628.160,63
		USD		1.054,50		128.575,50
2.	BPKP		1.034	133.449.803.971,60	1.364	15.726.287.115,39
3.	Itjen		7095	21.591.381.464,71	3391	6.063.923.089,32
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>8377</b>	<b>177.364.209.349,30</b>	<b>4894</b>	<b>36.102.838.365,34</b>
		USD		1.054,50		128.575,50

#### 6) Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan

Target 90% tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan ternyata terealisasi hanya 42,47% sehingga tingkat capaian target indikator kinerja ini cukup rendah hanya 47,19%. Hal ini dikarenakan:

- a) Frekuensi pemeriksaan/audit baik oleh APIP maupun BPK-RI meningkat sehingga konsentrasi para Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terfokus pada upaya menghadapi pelaksanaan pemeriksaan/audit dibanding waktu untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- b) Adanya kendala dalam penyelesaian tindak lanjut, yang disebabkan:
  - (1) Masih terdapat kewajiban penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga, antara lain penyelesaian temuan keuangan oleh rekanan, penyelesaian aset oleh Pemda setempat, dll).
  - (2) Pejabat/pegawai yang bertanggung untuk menyelesaikan tindak lanjut meninggal dunia;
  - (3) Perusahaan yang bertanggung untuk menyelesaikan tindak lanjut mengalami pailit.

Gambaran tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2011-2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13  
Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  
Tahun 2011

No	Unit Pengawasan		Jumlah Temuan		Jumlah Tindak Lanjut		Saldo Temuan	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	BPK-RI	Rp	248	22.323.023.912,99	102	9.253.368.989,04	146	13.069.654.923,95
		USD		1.054,50		1.054,50		0,00
2.	BPKP		1.034	133.449.803.971,60	487	115.083.714.734,88	547	18.366.089.236,72
3.	Itjen		7095	21.591.381.464,71	4232	16.974.084.195,72	2863	4.617.297.268,99
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	8377	177.364.209.349,30	4821	141.311.167.919,64	3556	36.053.041.429,66
	%				57,55	79,67	42,45	20,33
		<b>USD</b>		1.054,50		1.054,50		0,00
	%					100,00		0,00

Tabel 14  
Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  
Tahun 2012

No	Unit Pengawasan		Jumlah Temuan		Jumlah Tindak Lanjut		Saldo Temuan	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	BPK-RI	Rp	139	14.312.628.160,63	52	5.137.990.802,74	87	9.174.637.357,99
		USD		128.575,50		96,00		128.479,50
2.	BPKP		1.364	15.726.287.115,39	756	9.537.874.938,34	608	6.188.412.177,05
3.	Itjen		3391	6.063.923.089,32	1225	943.210.108,00	2166	5.120.712.981,32
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	4894	36.102.838.365,34	2033	15.619.075.849,08	2861	20.483.762.516,36
	%				41,54	43,26	58,46	56,74
		<b>USD</b>		128.575,50		96,00		128.479,50
	%					0,07		99,93

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kementerian Agama dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak luput dari dukungan anggaran. Anggaran Kementerian Agama bersumber dari APBN, Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran Kementerian Agama Tahun 2012 adalah sebesar Rp39.800.553.390.785,00

Dengan rincian :

- a. Belanja pegawai Rp17.622.894.828.334
- b. Belanja barang/jasa termasuk Hibah Rp 8.330.501.780.810
- c. Belanja modal termasuk Hibah Rp 3.380.624.069.641
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp10.466.532.712.000

2. Realisasi Anggaran Kementerian Agama per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp36.866.982.236.505 atau terealisasi 92,63% dari pagu anggaran

Dengan rincian :

- a. Belanja pegawai Rp18.321.622.964.216 (103,96%)  
 b. Belanja barang/jasa termasuk Hibah Rp7.044.954.148.609 ( 84,57%)  
 c. Belanja modal termasuk Hibah Rp2.683.216.610.040 ( 79,37%)  
 d. Belanja Bantuan Sosial Rp8.817.177.513.640 ( 84,24%)

Tabel 14  
 Realisasasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2012

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.786.718.077.000	1.571.318.337.989	87,94
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama	251.847.250.000	231.426.642.304	91,89
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	132.644.850.000	110.235.843.105	83,11
4	Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	504.194.312.000	431.295.208.580	85,54
5	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	479.760.974.000	402.220.806.502	83,84
6	Pendidikan Islam	31.825.637.652.965	29.484.556.967.317	92,64
7	Bimbingan Masyarakat Islam	2.721.994.364.000	2.652.653.631.034	97,45
8	Bimbingan Masyarakat Kristen	962.469.268.000	885.701.287.126	92,02
9	Bimbingan Masyarakat Katolik	532.739.204.820	527.695.663.248	99,05
10	Bimbingan Masyarakat Hindu	426.524.532.000	419.780.404.658	98,42
11	Bimbingan Masyarakat Budha	176.022.906.000	150.097.444.642	85,27
	<b>Jumlah</b>	<b>39.800.553.390.785</b>	<b>36.866.982.236.505</b>	<b>92,63</b>

Tabel 15

Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2012

(dalam Rupiah)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			ANGGARAN	%
<b>1</b>	<b>Realsiasi Pendapatan Negara</b>			
	- Penerimaan Pajak	0	0	0,00
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	617.711.719.436	884.703.032.598	143,22
	- Penerimaan Hibah			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	617.711.719.436	884.703.032.598	143,22
<b>2</b>	<b>Belanja Negara</b>			
	Belanja Transaksi Kas			
	Rupiah Murni	39.127.203.045.362	36.680.123.581.308	93,75
	- Belanja Pegawai	17.622.894.828.334	18.313.168.924.920	103,92
	- Belanja Barang	8.251.062.282.387	6.983.716.824.960	84,64
	- Belanja Modal	2.908.745.507.541	2.602.015.220.069	89,45
	- Belanja Bantuan Sosial	10.344.500.427.000	8.781.222.611.359	84,89
	Pinjamandan Hibah	673.350.345.423	146.517.889.243	21,75
	- Belanja Pegawai	0	0	0,00
	- Belanja Barang	79.439.498.423	33.911.951.523	42,69
	- Belanja Modal	471.878.562.000	80.607.580.820	17,08
	- Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
	Belanja Transaksi Non Kas	0	70.186.073.689	0,00
	- Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0,00
	- Belanja Barang Non Kas	0	70.096.073.689	0,00
	- Belanja Modal Non Kas	0	90.000.000	0,00
	- Belanja Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA (NETTO)</b>	<b>39.800.553.390.785</b>	<b>36.826.641.470.551</b>	<b>92,63</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Negara</b>			
	- Belanja Pegawai	17.622.894.828.334	18.321.622.964.216	103,96
	- Belanja Barang	8.330.501.780.810	7.044.954.148.609	84,57
	- Belanja Modal	3.380.624.069.641	2.683.216.610.040	79,37
	- Belanja Bantuan Sosial	10.466.532.712.000	8.817.177.513.640	84,24
	<b>JUMLAH BELANJA (BRUTO)</b>	<b>39.800.553.390.785</b>	<b>36.866.982.236.505</b>	<b>92,63</b>

Tabel 16  
Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2011 dan 2012

**(dalam Ribuan Rupiah)**

NO	PROGRAM	TAHUN 2011			TAHUN 2012		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.363.377.217	2.444.801.304	103,45	1.786.718.077	1.571.318.338	87,94
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama	94.994.400	92.911.454	97,83	251.847.250	231.426.642	91,89
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	95.332.091	89.995.311	94,40	132.644.850	110.235.843	83,11
4	Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	186.485.469	168.212.882	90,29	504.194.312	431.295.209	85,54
5	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	189.353.574	168.635.676	89,62	479.760.974	402.220.807	83,84
6	Pendidikan Islam	27.211.985.997	24.525.115.727	90,13	31.825.637.653	29.484.556.967	92,64
7	Bimbingan Masyarakat Islam	143.756.138	140.004.298	97,54	2.721.994.364	2.652.653.631	97,45
8	Bimbingan Masyarakat Kristen	124.292.444	119.353.244	96,05	962.469.268	885.701.287	92,02
9	Bimbingan Masyarakat Katolik	96.045.200	88.874.122	92,55	532.739.205	527.695.663	99,05
10	Bimbingan Masyarakat Hindu	72.594.772	70.363.784	97,29	426.524.532	419.780.405	98,42
11	Bimbingan Masyarakat Budha	56.893.366	49.194.322	90	176.022.906	150.097.445	85,27
	<b>Jumlah</b>	<b>30.635.110.668</b>	<b>27.957.462.126</b>	<b>91,26</b>	<b>39.800.553.391</b>	<b>36.866.982.237</b>	<b>92,63</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama tahun 2012 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2012 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kementerian Agama dalam tahun 2012 secara keseluruhan mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100,94%. Capaian tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2011 sebesar 92%. Salah satu yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Kementerian Agama adalah keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis bidang pendidikan Islam, dimana rata-rata capaian sasaran strategis bidang ini mencapai 119,30%. Adapun indikator kinerja yang mendukung ini adalah capaian target APK Madrasah Aliyah sebesar 191,56% dan APM Perguruan Tinggi Agama Islam yang mencapai 139,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi jumlah masyarakat Indonesia yang secara kasar merasakan jenjang pendidikan tingkat atas pada Lembaga Pendidikan Islam mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Ini menandakan bahwa selain animo masyarakat Indonesia yang semakin besar untuk merasakan jenjang pendidikan tinggi terutama pada PTAI juga dikarenakan semakin bersaing dan berkualitasnya pengelolaan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama. Satu lagi indikator kinerja yang telah memberikan kontribusinya dalam keberhasilan capaian sasaran strategis Kementerian Agama adalah indikator kinerja Rerata Nasional Ujian Nasional (UN) MTs Tahun 2012, meskipun tidak tercapai target namun hasilnya sudah sangat memuaskan yaitu 99,37%. Hal ini dapat dilihat dari capaian kelulusan UN MTs/Sederajat tahun 2012. Berdasarkan hasil penilaian dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Penyelenggara Ujian Nasional menyatakan bahwa **“Hasil kelulusan Ujian Nasional (UN) siswa MTs Tahun 2012 mencapai (99,69%); lebih tinggi dibanding persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Sederajat secara nasional (99,57%)”**. Kelulusan UN MTs tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yaitu 99,67%. Capaian yang sama juga diraih oleh siswa MTs dilihat dari Nilai Murni, Persentase kelulusan UN siswa MTs dengan Nilai Murni 5,5 keatas mencapai 92,29%; diatas kelulusan siswa SMP (91,37%); dan kelulusan secara nasional siswa SMP/MTs/Sederajat yaitu (91,37%).




Secara umum sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2012 telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang, diantaranya yaitu penyelesaian tindak lanjut temuan yang capaian targetnya hanya 47,20%.

Secara umum capaian sasaran strategis Kementerian Agama sudah baik dan sangat memuaskan, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut perlu dipertahankan atau ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama tahun 2012 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

**Jakarta, Maret 2013**  
Menteri Agama RI,



Suryadharma Ali

**LAMPIRAN:**

- 1. Rencana Kinerja Tahunan**
- 2. Penetapan Kinerja**
- 3. Pengukuran Kinerja**

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama  
Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional	1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama	43%
	2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama	45%
	3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	31%
	4. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	34%
<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional	1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk	15 lembaga
	2. Pemulihan Pasca konflik	1 kegiatan
	3. Rasio bantuan terhadap kebutuhan FKUB provinsi dan kabupaten/kota	50%
<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa	1. APK Lembaga Pendidikan Islam	
	- MI	13.55%
	- MTs.	20.22%
	- MA	7.35%
	- PTAI	2.89%
	2. APM Lembaga Pendidikan Islam	
- MI	10.59%	
- MTs.	14.82%	
- MA	6.46%	
- PTAI	2.35%	
3. Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional (UN)	8.00	
<b>Sasaran Strategis 4</b> Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat	1. Indeks kualitas pembinaan	50%
	2. Indeks kualitas Pelayanan	50%
	Indeks kualitas pengembangan informasi haji	50%
	2. Indeks kualitas pembinaan umrah	50%
<b>Sasaran Strategis 5</b> Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional	1. % SDM berkinerja sangat baik	40%
	2. Persentase ketersediaan SPM & SPO	80%
	3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP
	4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan	33 provinsi
	5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan	15%
	6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.	90%

## PENETAPAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama  
Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional	1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama	43%	1. Program Bimbingan Masyarakat Islam	2,721,994,364,000
	2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama	45%	2. Program Bimbingan Masyarakat Kristen	962,469,268,000
	3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	31%	3. Program Bimbingan Masyarakat Katolik	532,739,204,820
	4. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	34%	4. Program Bimbingan Masyarakat Hindu 5. Program Bimbingan Masyarakat Buddha	426,524,532,000 176,022,906,000
<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional	1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk;	15 lembaga	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	31,250,000,000
	2. Pemulihan Pasca konflik	1 kegiatan		
<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa	1. APK Lembaga Pendidikan Islam		1. Program Pendidikan Islam	31,825,637,652,965
	- MI	13.55%		
	- MTs.	20.22%		
	- MA	7.35%		
	- PTAI	2.89%		
	2. APM Lembaga Pendidikan Islam			
	- MI	10.59%		
	- MTs.	14.82%		
	- MA	6.46%		
	- PTAI	2.35%		
	3. Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional (UN)	8.00		
<b>Sasaran Strategis 4</b> Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat	1. Indeks kualitas pembinaan dan pelayanan haji dan umrah	50%	1. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah	479,760,974,000
	2. Indeks kualitas pengembangan informasi haji	50%		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Sasaran Strategis 5</b> Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional	1. % SDM berkinerja sangat baik	40%	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.755.468.077.000
	2. Persentase ketersediaan SPM & SPO	80%		
	3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP	2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama	251.847.250.000
	4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan	33 provinsi	3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	132.644.850.000
	5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan	15%		
	6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.	90%	4. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	504.194.312.000

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp39.800.553.390.785,-

Jakarta, April 2012  
 Menteri Agama RI

  
 Suryadharma Ali

**PENGUKURAN KINERJA**

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama  
Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional	1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama	43%	41.52%	96.56%	1. Program Bimbingan Masyarakat Islam	2,721,994,364,000	2,652,653,631,034	97.45%
	2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama	45%	43.70%	97.11%	2. Program Bimbingan Masyarakat Kristen	962,469,268,000	885,701,287,126	92.02%
	3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	31%	28.10%	90.65%	3. Program Bimbingan Masyarakat Katolik	532,739,204,820	527,695,663,248	99.05%
	4. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama	34%	31.80%	93.53%	4. Program Bimbingan Masyarakat Hindu	426,524,532,000	419,780,404,658	98.42%
					5. Program Bimbingan Masyarakat Buddha	176,022,906,000	150,097,444,642	85.27%
<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional	1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk;	15 lembaga	15 lembaga	100.00%	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	29,056,723,000	25,096,133,960	86.37%
	2. Pemulihan Pasca konflik	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%				
<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa	1. APK Lembaga Pendidikan Islam				1. Program Pendidikan Islam	31,825,637,652,965	29,484,556,967,317	92.64%
	- MI	13.55%	10.65%	78.60%				
	- MTs.	20.22%	18.64%	92.19%				
	- MA	7.35%	14.08%	191.56%				
	- PTAI	2.89%	3.28%	113.49%				
	2. APM Lembaga Pendidikan Islam							
	- PTAI	2.35%	3.28%	139.57%				
3. Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional (UN)	8.00	7.95	99.37%					

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Sasaran Strategis 4</b> Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat	1. Indeks kualitas pembinaan dan pelayanan haji dan umrah	50%	50,00%	100,00%	1. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah	479.760.974.000	402.220.806.502	83,84%
	2. Indeks kualitas pengembangan informasi haji	50%	50,00%	100,00%				
<b>Sasaran Strategis 5</b> Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional	1. % SDM berkinerja sangat baik	40%	38,80%	97,00%	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.757.661.354.000	1.546.222.204.029	87,97%
	2. Persentase ketersediaan SPM & SPO	80%	70,00%	87,50%	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian	251.847.250.000	231.426.642.304	91,89%
	3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP	WTP (DPP)	95,00%				
	4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan	33 provinsi	33 provinsi	100,00%	3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	132.644.850.000	110.235.843.105	83,11%
	5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan	15%	12,00%	120,00%				
	6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan.	90%	42,47%	47,19%	4. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	504.194.312.000	431.295.208.580	85,54%

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp39.800.553.390.785,00  
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 : Rp36.866.982.236.505,00 (92,63%)

Jakarta, Maret 2013  
Menteri Agama RI

  
Suryadharma Ali